



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP-85/K/D2/2022

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN VAKSINASI

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (9) huruf b Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-472/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin (COVID-19) di Tingkat Daerah dan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-514/K/D2/2021 tentang Pedoman

Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahap III dan IV bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

- b. bahwa untuk memudahkan pengawasan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun 2022, diperlukan adanya Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 866);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Pengawasan atas Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pedoman Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. memberikan panduan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam rangka pengawasan pelaksanaan vaksinasi penanggulangan pandemi COVID-19 di Tahun 2022.
 - b. sebagai rujukan untuk menyamakan persepsi antara tim audit agar diperoleh satu kesamaan arah dalam pengawasan pelaksanaan vaksinasi

COVID-19 Tahun 2022 baik primer maupun *booster*.

- KETIGA : Ruang lingkup Pedoman Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi program vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun 2022 yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan vaksinasi termasuk distribusi dan pengelolaan stok vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KEEMPAT : Pedoman Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat digunakan sebagai acuan oleh auditor pada:
- a. lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
 - b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah,
- dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun 2022.
- KELIMA : Pedoman Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-472/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tingkat Daerah dan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-514/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahap III dan Tahap IV bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2022

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,


MUHAMMAD YUSUF ATEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR KEP-85/K/D2/2022
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN VAKSINASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) TAHUN 2022

PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN VAKSINASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) belum berakhir dan masih menjadi ancaman terutama dengan munculnya varian baru Omicron. Untuk itu, antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilakukan.

Agar menjamin tercapainya tujuan/sasaran dalam penanggulangan pandemi COVID-19 dibutuhkan pengawasan internal yang memadai oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun 2022 secara umum tetap mengacu pada pedoman pengawasan vaksinasi yang diterbitkan tahun 2021 dengan beberapa penekanan fokus audit terkait dengan percepatan vaksinasi dosis ke-dua, vaksinasi program lanjutan (*booster*), dan distribusi vaksin COVID-19.

B. DASAR HUKUM

Pedoman pengawasan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan regulasi sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

dan dengan memperhatikan:

1. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-472/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Distribusi Dan Pengelolaan Persediaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tingkat Daerah;
2. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-514/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahap III dan IV bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Daerah;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1074/IJ Hal Optimalisasi Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2793/IJ Hal Pendampingan dan Monitoring *Stock Opname* Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-973/D2/01/2021 Hal Pengawasan atas Pelaksanaan *Stock Opname* Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Logistik Penunjang per 31 Desember 2021 pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia; dan
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/252/2022 Hal Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dosis Lanjutan (*Booster*).

C. TUJUAN PEDOMAN PENGAWASAN

Pedoman pengawasan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan pelaksanaan vaksinasi penanggulangan pandemi COVID-19 di tahun 2022; dan
- b. menjadi rujukan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menyamakan persepsi antara tim audit agar diperoleh satu kesamaan arah dalam pengawasan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahun 2022 baik primer maupun *booster*.

D. SISTEMATIKA PEDOMAN

Pedoman pengawasan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum, tujuan pedoman pengawasan, dan sistematika pedoman.

2. BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan pengertian vaksinasi dan pengawasan pelaksanaan vaksinasi.

3. BAB III PROGRAM KERJA PENGAWASAN

Bab ini menguraikan menguraikan tujuan pengawasan, metodologi, ruang lingkup, obyek pengawasan, waktu pengawasan, sampling dan program kerja pengawasan.

4. BAB IV PELAPORAN

Bab ini mengatur dan menguraikan output dan kerangka waktu pelaporan, Alur penugasan dan Pelaporan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun 2022, dan format Laporan Hasil Pengawasan.

BAB II GAMBARAN UMUM

A. PENGERTIAN VAKSINASI

1. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
2. Vaksinasi Program adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah.
3. Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.
4. Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*booster*) adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat Vaksinasi Primer Dosis Lengkap yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan.

B. PENGERTIAN PENGAWASAN

1. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan

Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PROGRAM KERJA PENGAWASAN

A. TUJUAN PENGAWASAN

Tujuan umum pengawasan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 telah dilaksanakan melalui tata kelola yang baik dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui.

B. METODE PENGAWASAN

Metode Pengawasan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 meliputi:

1. Bentuk pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 terdiri dari:
 - a. audit;
 - b. evaluasi;
 - c. pemantauan (*monitoring*); dan
 - d. kegiatan pengawasan lainnya.
2. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
3. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan
4. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, *Quality assurance*, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

C. SASARAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Sasaran Pengawasan adalah program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh:

1. Pusat
 - a. K/L di tingkat pusat yang melaksanakan program vaksinasi;
2. Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - a. Dinas Kesehatan Provinsi; dan
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - a. Puskesmas;
 - b. Klinik;
 - c. Rumah Sakit; dan
 - d. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
4. Pelaksanaan Vaksinasi di Luar Fasyankes seperti Vaksinasi Massal, Vaksinasi di Instansi Pemerintah, *Drive Thru* atau yang sejenisnya.

Ruang lingkup pengawasan adalah program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi, termasuk distribusi dan pengelolaan stok vaksin COVID-19.

D. PELAKSANA PENGAWASAN

1. Pengawasan di level pusat dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) K/L terkait dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat.
2. Pengawasan di level daerah dilakukan oleh APIP daerah, APIP K/L dan Perwakilan BPKP sesuai dengan wilayah kerjanya.
3. Masing-masing APIP agar mengalokasikan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan vaksinasi COVID-19.
4. Antar APIP berkoordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran pengawasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan vaksinasi COVID-19.
5. BPKP menjadi koordinator terhadap kegiatan pengawasan vaksinasi COVID-19 di tingkat pusat dan daerah.

NO	Pelaksana Pengawasan	Sasaran Pengawasan
I	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) K/L terkait dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat	Kementerian Kesehatan, Fasyankes Vertikal, Prov dan Kab/Kota
		Vaksinasi di luar Fasyankes yang diselenggarakan K/L
	Itjen TNI, Itjen TNI AD, Itjen TNI AL, Itjen TNI AU /Itwasum POLRI	Fasyankes Vertikal dan Vaksinasi di luar Fasyankes yang diselenggarakan TNI/POLRI
		Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota, Fasyankes Vertikal, Prov dan Kab/Kota, termasuk Fasyankes di lingkungan TNI/Polri di daerah
BPKP Perwakilan	Vaksinasi di luar Fasyankes yang diselenggarakan K/L/D	
II	Inspektorat Provinsi	Dinas Kesehatan Provinsi dan Fasyankes Provinsi
		Vaksinasi di luar Fasyankes yang diselenggarakan Provinsi
II	Inspektorat Kab/Kota	Dinas Kes Kab/Kota dan Fasyankes Kab/Kota
		Vaksinasi di luar Fasyankes yang diselenggarakan Kabupaten/Kota

E. RENCANA WAKTU PENGAWASAN

Rencana Pelaksanaan pengawasan Kegiatan Vaksinasi COVID-19 tahun 2022 dilakukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan dan pelaporan individu, dilaksanakan pada Minggu ke IV pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November 2022.
2. Pelaksanaan Kompilasi tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Minggu ke II pada Bulan Maret, Juni, September dan Desember 2022.
3. Kompilasi laporan se- Provinsi oleh Perwakilan BPKP dilaksanakan pada minggu ke-III Bulan Maret, Juni, September dan Desember.
4. Sintesa Hasil Pengawasan Nasional/Kompilasi laporan tingkat BPKP Pusat dilakukan pada minggu ke IV bulan Maret, Juni, September dan Desember.

F. SAMPLING PENGAWASAN

Perwakilan BPKP dan atau APIP Provinsi/Kab/Kota melakukan pengawasan terhadap Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota dan Kodam/Korem/Polda sesuai dengan wilayah kerjanya. Sedangkan untuk Fasyankes dan Kegiatan Vaksinasi di luar fasyankes dilakukan secara sampling.

G. PROGRAM KERJA AUDIT

Untuk menjamin keseragaman tindak dan untuk mencapai tujuan pengawasan yang telah ditetapkan, langkah-langkah audit untuk setiap Tentative Audit Objective (TAO) dengan mengacu pada:

1. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-472/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Distribusi Dan Pengelolaan Persediaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tingkat Daerah; dan
2. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-514/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahap III dan IV bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Untuk pengawasan tahun 2022, *Tentative Audit Objective* dan langkah kerja tetap menggunakan Keputusan Kepala BPKP di atas, namun terdapat penekanan fokus pengawasan pada tahun 2022 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pusat

Bagi APIP yang melaksanakan pengawasan pada level pusat agar melaksanakan point-point pengawasan sebagai berikut:

No	TAO	Fokus Pengawasan 2022	Panduan Langkah Kerja
a	<i>Grand Design</i> untuk mencapai <i>Herd Immunity</i> tahun 2021 belum ditetapkan/memadai.	Progres capaian vaksinasi (dosis 2 dan <i>booster</i>)	Perka BPKP Nomor 514/K/D2/2021
b	Pendataan dan Penetapan sasaran vaksinasi belum dilakukan secara memadai	Progres capaian vaksinasi (dosis 2 dan <i>booster</i>)	Perka BPKP Nomor 514/K/D2/2021
c	Distribusi vaksin dari Pusat ke provinsi tidak sesuai dengan ketentuan	Analisis ketersediaan stok	Perka BPKP Nomor 514/K/D2/2021
d	Distribusi jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (<i>Auto Disable Syringe, Alcohol Swab, Safety box</i>) tidak sesuai dengan ketentuan.	Ketepatan jumlah, sasaran, waktu, kualitas dan administrasi	Perka BPKP Nomor 514/K/D2/2021
e	Target waktu dan jumlah sasaran nasional setiap tahapan yang telah ditetapkan tidak tercapai	Percepatan dan pemerataan vaksinasi	Perka BPKP Nomor 514/K/D2/2021

f	Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	Ketepatan jumlah, dan administrasi	Perka BPKP Nomor 514/K/D2/2021
---	---	------------------------------------	--------------------------------

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP K/L apabila ditemukan hal-hal penting lainnya namun masih dalam lingkup pengawasan.

2. Provinsi

Bagi APIP yang melaksanakan pengawasan pada level provinsi agar melaksanakan point-point pengawasan sebagai berikut:

No	TAO	Fokus Pengawasan 2022	Panduan Langkah Kerja
a	Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan	Ketepatan jumlah, kualitas dan administrasi	Perka BPKP No 514/K/D2/2021
b	Distribusi dan penyimpanan vaksin di provinsi/HUB tidak sesuai dengan ketentuan.	Distribusi vaksinasi (sejak alokasi, penetapan, distribusi dan penyimpanan di gudang), ketepatan kualitas dan waktu	Perka BPKP Nomor 514/K/D2/2021 dan Nomor 472/K/D2/2021
c	Distribusi jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (<i>Auto Disable Syringe, Alcohol Swab, Safety box</i>) tidak sesuai dengan ketentuan.	Ketepatan jumlah, waktu, kualitas dan administrasi	Perka BPKP Nomor 514/K/D2/2021
d	Target sasaran dan waktu tahapan vaksinasi yang telah ditetapkan tidak tercapai.	Percepatan dan pemerataan vaksinasi, Progres capaian vaksinasi (dosis 2 dan booster), ketepatan jumlah dan sasaran	Perka BPKP Nomor 514/K/D2/2021
e	Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di provinsi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	Ketepatan jumlah, waktu, dan administrasi	Perka BPKP Nomor 514/K/D2/2021
f	Stok vaksin tidak sesuai dengan catatan manual dan/atau elektronik.	Ketepatan jumlah dan administrasi	Perka BPKP Nomor 514/K/D2/2021 dan Nomor 472/K/D2/2021s
g	Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi tidak optimal	Ketepatan jumlah dan administrasi	Perka BPKP Nomor 514/K/D2/2021
h	Terdapat Penumpukan Vaksin covid-19 di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi yang tidak segera didistribusikan	Distribusi vaksinasi (sejak alokasi, penetapan, distribusi dan penyimpanan di gudang), ketepatan waktu	Perka BPKP Nomor 514/K/D2/2021

i	Kualitas dan kuantitas <i>cold chain</i> vaksin di daerah provinsi/HUB seperti, <i>cold room, freeze room, refrigerator</i> , dan <i>freezer</i> tidak memadai	Ketepatan jumlah dan kualitas	Perka BPKP Nomor 514/K/D2/2021
---	--	-------------------------------	--------------------------------

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP K/L apabila ditemukan hal-hal penting lainnya namun masih dalam lingkup pengawasan.

3. Kabupaten/Kota

Bagi APIP yang melaksanakan pengawasan pada level Kabupaten/Kota/EP Kako agar melaksanakan point-point pengawasan sebagai berikut:

No	TAO	Fokus Pengawasan 2022	Panduan Langkah Kerja
a	Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan	Ketepatan jumlah	Perka BPKP No 514/K/D2/2021
b	Distribusi dan penyimpanan vaksin di Kabupaten Kota tidak sesuai dengan ketentuan.	Distribusi vaksinasi (sejak alokasi, penetapan, distribusi dan penyimpanan di gudang), ketepatan jumlah dan kualitas	Perka BPKP Nomor 514/K/D2/2021 dan Nomor 472/K/D2/2021
c	Distribusi jumlah dan jenis peralatan pendukung/logistik (<i>Auto Disable Syringe, Alcohol Swab, Safety box</i>) tidak sesuai dengan ketentuan.	Ketepatan jumlah, waktu, kualitas dan administrasi	Perka BPKP No 514/K/D2/2021
d	Target sasaran dan waktu tahapan vaksinasi yang telah ditetapkan tidak tercapai	Percepatan dan pemerataan vaksinasi, Progres capaian vaksinasi (dosis 2 dan booster), ketepatan jumlah dan sasaran	Perka BPKP No 514/K/D2/2021
e	Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di kabupaten/kota tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	Ketepatan jumlah, waktu, dan administrasi	Perka BPKP No 514/K/D2/2021
f	Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi tidak optimal	Ketepatan jumlah dan administrasi	Perka BPKP No 514/K/D2/2021
g	Stock vaksin tidak sesuai dengan catatan manual dan/atau elektronik	Ketepatan jumlah dan administrasi	Perka BPKP Nomor 514/K/D2/2021 dan Nomor

			472/K/D2/2021
h	Terdapat sasaran vaksinasi yang menolak dilakukan vaksinasi	Ketepatan sasaran	Perka BPKP No 514/K/D2/2021
i	Terdapat Penumpukan Vaksin covid-19 di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang tidak segera didistribusikan	Distribusi vaksinasi (sejak alokasi, penetapan, distribusi dan penyimpanan di gudang), ketepatan waktu	Perka BPKP No 514/K/D2/2021
j	Kualitas dan kuantitas <i>cold chain</i> (rantai dingin) vaksin di kabupaten/kota/Hub seperti, <i>coldroom, freeze room, refrigerator, dan freezer</i> tidak memadai.	Ketepatan jumlah dan kualitas	Perka BPKP No 514/K/D2/2021

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP K/L apabila ditemukan hal-hal penting lainnya namun masih dalam lingkup pengawasan.

4. Fasyankes

Bagi APIP yang melaksanakan pengawasan pada level Fasyankes agar melaksanakan point-point pengawasan sebagai berikut:

No	TAO	Fokus Pengawasan 2022	Panduan Langkah Kerja
a	Terdapat vaksinasi <i>booster</i> tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan	Progres capaian vaksinasi (dosis 2 dan <i>booster</i>), ketepatan sasaran	Peraturan Kepala BPKP Nomor Kep-514/K/D2/2021
b	Jumlah vaksin yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan	Ketepatan jumlah	Peraturan Kepala BPKP Nomor Kep-514/K/D2/2021
c	Tidak dilakukan pencatatan atas penggunaan vaksin secara manual maupun elektronik secara tertib	Ketepatan jumlah dan administrasi	Perka BPKP Nomor 514/K/D2/2021 dan Nomor 472/K/D2/2021
d	Pemakaian vaksin melebihi <i>wastage rate</i> yang telah ditetapkan tidak dicatat	Efisiensi penyuntikan vaksin dan vaksi tidak termanfaatkan (<i>wastage</i>)	Peraturan Kepala BPKP Nomor Kep-514/K/D2/2021
e	Pengambilan, pemakaian dan penyimpanan vaksin oleh petugas atau vaksinator tidak sesuai ketentuan.	Ketepatan jumlah dan kualitas	Peraturan Kepala BPKP Nomor Kep-514/K/D2/2021
f	Ditemukan kualitas vaksin yang tidak sesuai dengan ketentuan	Ketepatan kualitas	Peraturan Kepala BPKP Nomor Kep-514/K/D2/2021

g	Terdapat sasaran vaksinasi yang menolak dilakukan vaksinasi	Ketepatan sasaran	Peraturan Kepala BPKP Nomor Kep-514/K/D2/2021
h	Pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi tidak optimal	Ketepatan jumlah dan administrasi	Peraturan Kepala BPKP Nomor Kep-514/K/D2/2021
i	<i>Cold chain</i> atau tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai standard	Ketepatan kualitas	Peraturan Kepala BPKP Nomor Kep-514/K/D2/2021

Terhadap TAO tersebut di atas masih dapat ditambahkan oleh APIP K/L apabila ditemukan hal-hal penting lainnya namun masih dalam lingkup pengawasan.

5. Luar Fasyankes

Bagi APIP yang melaksanakan pengawasan pada kegiatan vaksinasi dil luar fasyankes (seperti vaksinasi massal, *drive thru*, dsb) agar melaksanakan point-point pengawasan sebagai berikut:

No	TAO	Fokus Pengawasan 2022	Panduan Langkah Kerja
a	Tidak mencapai jumlah target sasaran vaksinasi yang telah ditetapkan	Ketepatan jumlah	Peraturan Kepala BPKP Nomor Kep-514/K/D2/2021
b	Tidak dilakukan pencatatan atas penggunaan vaksin	Ketepatan jumlah dan administrasi	Peraturan Kepala BPKP Nomor Kep-514/K/D2/2021
c	Pemakaian vaksin melebihi <i>wastage rate</i> yang telah ditetapkan tidak dicatat	Efisiensi penyuntikan vaksin dan vaksi tidak termanfaatkan (<i>wastage</i>)	Peraturan Kepala BPKP Nomor Kep-514/K/D2/2021
d	Pengambilan, pemakaian dan penyimpanan vaksin oleh tim vaksinasi tidak sesuai ketentuan.	Ketepatan jumlah, waktu, kualitas dan administrasi	Peraturan Kepala BPKP Nomor Kep-514/K/D2/2021
e	Ditemukan kualitas vaksin yang tidak sesuai dengan ketentuan	Ketepatan kualitas	Peraturan Kepala BPKP Nomor Kep-514/K/D2/2021
f	Pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi tidak optimal	Ketepatan jumlah dan administrasi	Peraturan Kepala BPKP Nomor Kep-514/K/D2/2021
g	<i>Cold chain</i> atau tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai standard	Ketepatan kualitas	Peraturan Kepala BPKP Nomor Kep-514/K/D2/2021

BAB IV
PELAPORAN

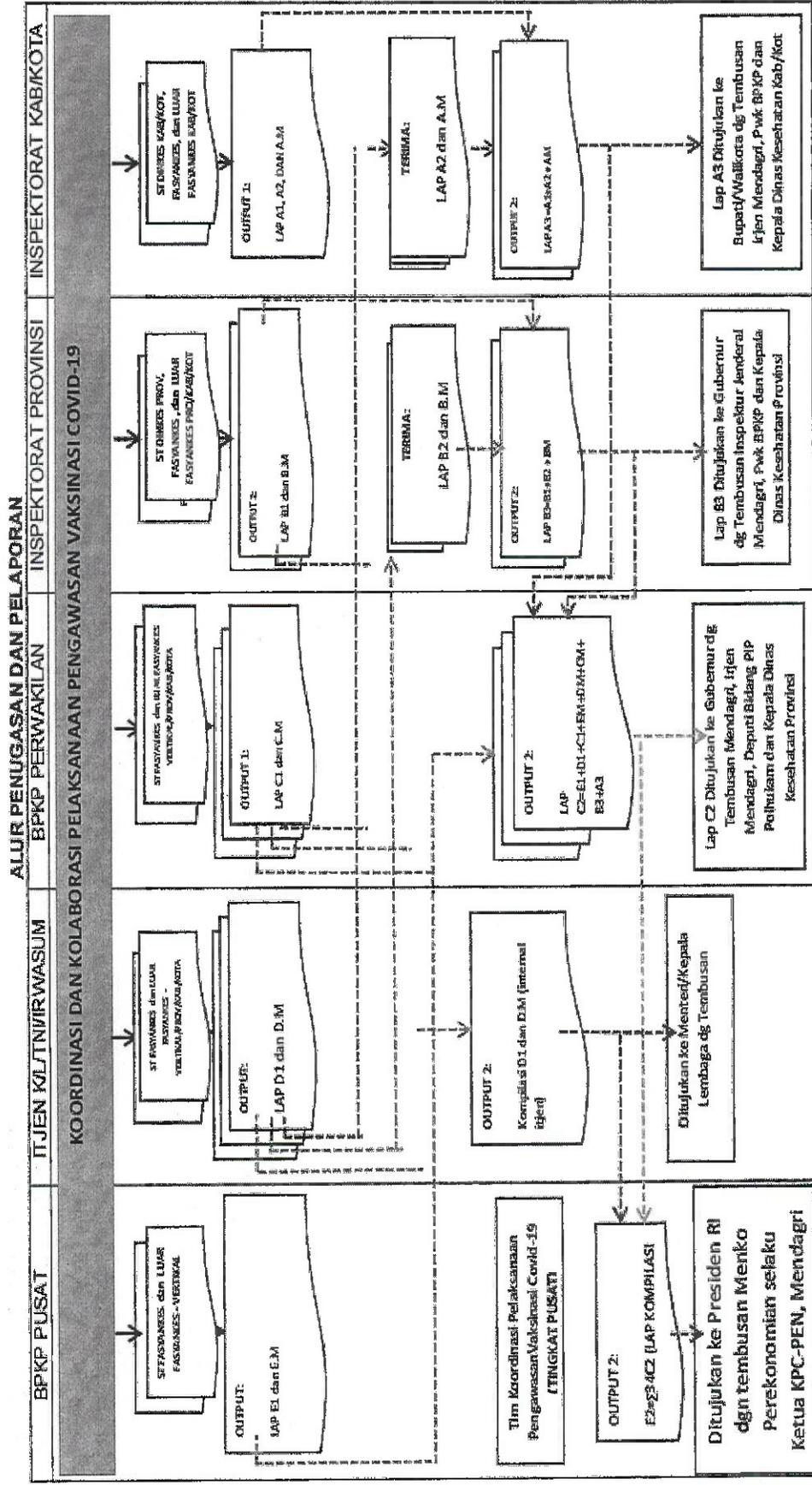
A. OUTPUT DAN KERANGKA WAKTU LAPORAN

NO	APIP	RUANG LINGKUP PENUGASAN	TUJUAN SURAT TUGAS	OUTPUT (LAPORAN)	TUJUAN LAPORAN	TEMBUSAN LAPORAN	BATAS WAKTU PENERBITAN LAPORAN
1.	INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA	a. Dinas Kesehatan Kab/Kota; b. Fasyankes Kab/Kota; dan c. Vaksinasi di luar Fasyankes yang diselenggarakan di Kab/Kota.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota .	a. Lap A1- Dinkes Kab/kota; b. Lap Fasyankes Kab/Kota; c. Lap A.M; dan d. Lap monitoring vaksinasi di luar fasyankes pada kab/kota.	Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.	-	Minggu I Maret, Juni, September dan Desember.
		Kompilasi Pemerintah Kabupaten/Kota.		Lap A3=A1+A2+A.M (Kompilasi Kabupaten/Kota)	Bupati/Walikota	a. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi; b. Inspektur Jenderal Mendagri; c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan d. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.	Minggu II Maret, Juni, September dan Desember.
2.	INSPEKTORAT PROVINSI	a. Dinas Kesehatan Provinsi; b. Fasyankes Provinsi; c. Vaksinasi di luar	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.	a. Lap B1- Dinkes Provinsi; b. Lap B2- Fasyankes Provinsi; dan	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.	-	Minggu I Maret, Juni, September dan Desember.

		Fasyankes yang diselenggarakan di Provinsi.		c. Lap B.M Monitoring vaksinasi di luar fasyankes pada Provinsi.	Gubernur	a. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi; b. Inspektur Jenderal Mendagri; c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; dan d. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.	Minggu II Maret, Juni, September dan Desember.
		Kompilasi Pemerintah Provinsi.		Lap B3=B1+E2+EM (Kompilasi Provinsi)			
		a. Fasyankes Kabupaten/Kota; dan b. Vaksinasi di luar Fasyankes yang diselenggarakan di Kab/Kota.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.	a. Lap A2 Fasyankes Kabupaten/Kota; b. Lap A.M; dan c. Lap Monitoring Vaksinasi di luar fasyankes pada Kab/Kota.	Kepala Kesehatan Kabupaten/Kota.	Inspektur Kabupaten/Kota.	Minggu I Maret, Juni, September dan Desember.
3.	PERWAKILAN BPKP	a. Fasyankes Provinsi; dan b. Vaksinasi di luar Fasyankes yang diselenggarakan di Provinsi.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.	a. Lap B2 Fasyankes Provinsi; b. Lap B.M Monitoring vaksinasi di luar fasyankes pada Provinsi	Kepala Kesehatan Provinsi.	Inspektur Provinsi	Minggu I Maret, Juni, September dan Desember.
		a. Fasyankes Kabupaten/Kota; dan b. Vaksinasi di luar	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/	a. Lap A2- Fasyankes Kab/Kota; dan b. Lap A.M - Lap	Kepala Kesehatan Kab/Kota.	Inspektur Kabupaten/Kota.	Minggu I Maret, Juni, September dan Desember.

		Fasyankes yang diselenggarakan di Kab/Kota	Kota.	monitoring vaksinasi di luar fasyankes pada kab/kota.			
		Fasyankes Vertikal (RS Vertikal/KKP/TNI dan Polri).	Pimpinan Fasyankes Vertikal/Pangdam/Danlanud/Danrem/Kapolda.	Lap C1 (Fasyankes Vertikal).	Pimpinan Fasyankes Vertikal/Pangdam/Danlanud/Danrem/Kapolda.	Irjen K/L/TNI/Irwasum.	Minggu I Maret, Juni, September dan Desember.
		Monitoring Vaksinasi di luar Fasyankes pada K/L/TNI/Polri.	Penanggung Jawab Kegiatan K/L/TNI/Polri.	Lap C.M (Lap Monitoring vaksinasi di luar fasyankes pada K/L).	Penanggung Jawab Kegiatan K/L/TNI/Polri.	Irjen K/L/TNI/Irwasum.	Minggu I Maret, Juni, September dan Desember.
		Kompilasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.		Lap C2= A3+B3+C1+C.M+D1+D.M+E1+E.M (Kompilasi Provinsi dan Kabupaten/Kota).	Gubernur.	a. Irjen Mendagri; b. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK; c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; dan d. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.	Minggu III Maret, Juni, September dan Desember.
4.	INSPEKTORAT JENDERAL K/L/TNI/IRWASUM	a. Fasyankes Provinsi; dan b. Vaksinasi di luar Fasyankes yang diselenggarakan di Provinsi.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.	a. Lap B2-Fasyankes Provinsi; dan b. Lap B.M - Monitoring vaksinasi di luar fasyankes pada Provinsi.	Kepala Kesehatan Provinsi.	Inspektur Provinsi.	Minggu I Maret, Juni, September dan Desember.
		a. Fasyankes Kabupaten/Kota;	Kepala Dinas	a. Lap A2-Fasyankes	Kepala Kesehatan	Inspektur Kabupaten/Kota.	Minggu I Maret, Juni, September dan

B. ALUR PENUGASAN DAN PELAPORAN PENGAWASAN PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-2019)



C. FORMAT LAPORAN

Format laporan hasil audit dan monitoring terdiri dari:

1. Laporan Dinas Kesehatan
 - a. Laporan A1 (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota); dan
 - b. Laporan B1 (Dinas Kesehatan Provinsi).
2. Laporan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
 - a. Laporan A2 (Fasyankes Kab/Kota);
 - b. Laporan B2 (Fasyankes Provinsi);
 - c. Laporan C1 (Fasyankes Vertikal yang diaudit Perwakilan BPKP);
 - d. Laporan D1 (Fasyankes Vertikal yang diaudit Itjen K/L/TNI/Itwasum Polri sesuai lingkungannya masing-masing); dan
 - e. Laporan E1 (Fasyankes Vertikal yang diaudit BPKP Pusat).
3. Laporan Luar Fasyankes
 - a. Laporan AM (Luar Fasyankes pada Kab/Kota);
 - b. Laporan BM (Luar Fasyankes pada Provinsi);
 - c. Laporan CM (Luar Fasyankes Vertikal yang diaudit Perwakilan BPKP);
 - d. Laporan DM (Luar Fasyankes Vertikal yang diaudit Itjen K/L/TNI/Itwasum Polri sesuai lingkungannya masing-masing); dan
 - e. Laporan EM (Luar Fasyankes Vertikal yang diaudit BPKP Pusat).
4. Laporan Kompilasi Daerah
 - a. Laporan A3 (Kompilasi Kab/Kota); dan
 - b. Laporan B3 (Kompilasi Provinsi).
5. Laporan Kompilasi Perwakilan BPKP
Laporan C2 (Kompilasi Provinsi/Kab/Kota).
6. Laporan Kompilasi BPKP Pusat.
Laporan E2 (Kompilasi nasional).

LOGO/KOP
APIP KABUPATEN/KOTA

LAPORAN HASIL AUDIT
ATAS PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA.....
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN(tanggal cut
off data pengawasan)

NOMOR :
TANGGAL : 2022

LOGO/KOP APIP KABUPATEN/KOTA
Identitas dan Alamat APIP

Nomor : 2022

Lampiran : ...

Hal : Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota..... untuk periode sampai dengan (bulan, tahun) (tanggal cut off data pengawasan)

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.....
di ...

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota..... untuk periode sampai dengan, dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan audit

Dasar pelaksanaan audit adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021* tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) (jika terdapat Juknis yang terbaru/terkini, maka dapat menggunakan juknis tersebut sebagai acuan)).
- e. Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-472/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Tingkat Daerah;
- f. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-514/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tahap III dan IV bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
- g. Keputusan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan nomor KEP- /D2/03/2022 tentang Panduan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahun 2022;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/423/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); (jika terdapat Juknis yang terbaru/terkini, maka dapat menggunakan juknis tersebut sebagai acuan)
- i. Surat Tugas Inspektur Kabupaten/Kota..... Nomor ST-..... tanggal perihal

2. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 telah dilaksanakan melalui tata kelola yang baik dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui.

3. Sasaran dan ruang lingkup audit

Sasaran audit adalah menilai Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.... telah menjalankan program vaksinasi secara efektif dan efisien dengan

memperhatikan ketepatan Jumlah, ketepatan Sasaran, Ketepatan Waktu, Ketepatan Administrasi, Ketepatan Kualitas, dan kecukupan Pengendalian Risiko *Fraud*.

Ruang lingkup audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi untuk periode sampai dengan.....

4. Batasan Tanggung Jawab

Auditor hanya bertanggung jawab sebatas simpulan hasil audit. Kebenaran dan validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor sebagai dasar pengambilan simpulan menjadi tanggung jawab manajemen program atau pihak-pihak terkait yang menyampaikan dokumen.

5. Metode audit

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 adalah:

- a. Perencanaan audit antara lain pemahaman bisnis proses, mitigasi risiko dan penyusunan pedoman audit termasuk penyusunan langkah kerja audit serta penetapan waktu audit.
- b. Penetapan jumlah sampling pengujian, analisis terhadap data kuantitatif atas data primer dan data sekunder yang tersedia dan diperoleh dari lembaga/instansi pemerintah termasuk wawancara dengan *stakeholder* serta prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
- c. Audit dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

6. Informasi umum

a. Identitas auditan

Menginformasikan nama Dinas, alamat kantor, serta nama pimpinan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

b. Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Vaksinasi

- 1) *Data yang disajikan merupakan data dan informasi akumulatif sejak awal tahun 2022 sampai dengan cut off tanggal periode pengawasan.*
- 2) *Menginformasikan sumber dana, pagu anggaran, dan realisasi penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.*
- 3) *Anggaran merupakan dukungan dari APBN/APBD (Kabupaten/Kota)/sumber dana Lainnya untuk pelaksanaan vaksinasi*

Tabel-1

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Prosentase
1.	APBN			
2.	APBD			
3.	Lainnya			
Jumlah				

c. Pencatatan Realisasi Distribusi Vaksin Covid-19.

- 1) *Data yang disajikan merupakan data dan informasi akumulatif sejak dimulainya kegiatan vaksinasi covid-19 sampai dengan cut off tanggal periode pengawasan*
- 2) *Menginformasikan penerimaan dan distribusi vaksin program yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan data SMILE Dinas Kabupaten/Kota.*

Tabel-2

No	Jenis Vaksin	Total Penerimaan (dosis)	Penerimaan Pengembalian(dosis)	Total Distribusi (dosis)	Total Pengembalian Distribusi (dosis)	Total Pembuangan (dosis)	Total Konsumsi (dosis)	Sisa (dosis)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Coronavic
2	Astrazeneca
3	Moderna
4	Pfizer
5	Sinopharm (exhibah UEA)
6	Vaksin program Lainnya (sebutkan)
Total	

Sumber: output SMILE level Dinkes Kako Pemerintah Kab/Kota... per (tanggal cut off audit)

d. Target dan Realisasi Sasaran Vaksinasi.

- 1) *Menginformasikan capaian vaksinasi kelompok sasaran vaksinasi*

secara keseluruhan

- 2) Data yang disajikan merupakan data dan informasi akumulatif dari mulainya kegiatan vaksinasi covid-19 sampai dengan cut off tanggal periode pengawasan;
- 3) Kolom (3) menginformasikan jumlah total target sasaran vaksinasi;
- 4) Kolom (4), (6), (8) menginformasikan jumlah sasaran yang berhasil disuntik pada suntikan ke- 1, -2, dan -3;
- 5) Kolom (5), (7), (9) menginformasikan capaian target vaksinasi di kabupaten/kota per kelompok sasaran yang diperoleh dari total sasaran yang divaksin dibanding dengan total target sasaran per periode suntikan;

Tabel-3. Sasaran Vaksinasi: keseluruhan

No	Kategori Sasaran	Total Target Sasaran	Suntikan ke 1		Suntikan ke 2		Suntikan ke 3 (Booster)	
			Jumlah orang	Capaian Target (%)	Jumlah orang	Capaian Target (%)	Jumlah orang	Capaian Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	SDM Kesehatan	...Org	...OrgOrgOrg	...
2.	Lansia	...Org	...OrgOrgOrg	...
3.	Petugas Publik	...Org	...OrgOrgOrg	...
4.	Masyarakat rentan dan Umum	...Org	...OrgOrgOrg	...
5.	Remaja	...Org	...OrgOrgOrg	...
6.	Anak-anak	...Org	...OrgOrgOrg	...
Jumlah total		...Org	...Org	%	...Org	%	...Org	%

Cantumkan sumber data dan tanggal dan jam cut off pelaporan.

Sumber data = Output Aplikasi satu data vaksinasi atau Aplikasi P-Care.

7. Temuan audit Umum.

a. Penilaian ketepatan Sasaran

- a) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan sasaran program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi".
- b) Temuan terkait ketidaktepatan sasaran, antara lain:
 - Terdapat Penolakan Vaksinasi COVID-19 oleh sasaran
 - Terdapat penyuntikan vaksinasi booster di luar kriteria sasaran yang telah ditetapkan

- Terdapat penyuntikan booster atas sasaran yang belum memiliki tiket

b. Penilaian ketepatan Jumlah

- a) Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan jumlah program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi".

Temuan ketidaktepatan jumlah :

- 1) Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan
- 2) Jumlah peralatan pendukung dan logistic tidak memenuhi kebutuhan vaksinasi
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi
- 4) Jumlah Vaksinator dan Tenaga Kesehatan lainnya tidak memenuhi kebutuhan vaksinasi
- 5) dst

c. Penilaian ketepatan Waktu

- 1) Uraikan permasalahan terkait dengan kesiapan dan kesesuaian jadwal dinkes Kesehatan kabupaten/kota pada kegiatan vaksinasi, distribusi vaksin dan logistik yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi".

- 2) Contoh temuan terkait ketidaktepatan Waktu, antara lain:

- Terdapat Penumpukan Vaksin covid-19 di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang tidak segera didistribusikan
- Terdapat vaksin yang mendekati masa kadaluarsa yang belum dapat didistribusikan/digunakan
- Distribusi vaksin terlambat.
- Distribusi alat pendukung terlambat
- Dst

d. Penilaian Ketepatan Kualitas

- 1) Uraikan permasalahan terkait dengan ketepatan kualitas program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus

mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditor dan rekomendasi";

- 2) *Contoh temuan terkait ketidaktepatan Kualitas, antara lain*
- *Dokumentasi pemantauan suhu vaksin tidak dilakukan secara konsisten*
 - *Cold chain tempat penyimpanan vaksin covid-19 belum dikalibrasi*
 - *kualitas cold chain tempat penyimpanan vaksin covid-19 tidak memadai*
 - *Penyimpanan vaksin tidak sesuai standar suhu penyimpanan*
 - *Gudang farmasi/Tempat penyimpanan vaksin tidak memiliki genset untukantisipasi kedaruratan atau genset tidak berfungsi optimal*
 - *Jenis peralatan pendukung dan logistic tidak memenuhi kebutuhan*
 - *Pelaksanaan Distribusi oleh Kabupaten Kota tidak sesuai dengan CDOB*
 - *dst*
- 3) *Diharapkan agar APIP Melakukan koordinasi, klarifikasi dan diskusi dengan BPOM setempat atas hasil audit mengenai ketepatan kualitas*

e. Penilaian Ketepatan Administrasi

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan administrasi pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi". Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

Contoh temuan terkait ketidaktepatan administrasi antara lain:

a. Tidak dilakukan pencatatan vaksin secara elektronik (SMILE) secara tertib

Dari Hasil Stok Opname atas vaksin program di gudang farmasi EP Kabupaten/Kota pada tanggal 2021 (tanggal dilakukan pemeriksaan fisik persediaan oleh auditor), terdapat pencatatan vaksin secara elektronik (SMILE) tidak dilakukan secara tertib. Hal ini terlihat dari saldo sisa stok vaksin menurut smile yang berbeda dengan hasil stock opname per tanggal..... yang dapat diuraikan dalam tabel berikut:

No	Jenis Vaksin	Sisa Stok pemeriksaan fisik (dosis)	Sisa Stok menurut SMILE (dosis)	Selisih (3-4) (dosis)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Coronavac
2.	Astrazeneca
3.	Moderna
4.	Pfizer
5.	Sinopharm (ex hibah UEA)
6.	Vaksin program Lainnya
	Total

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan (*penyebab berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):

- a) Jumlah SDM yang terbatas
- b) keterbatasan jaringan internet
- c) tidak dilakukan stok opname secara bulanan/berkala
- d) tidak dilakukan rekonsiliasi antara hasil stok opname fisik dengan SMILE secara berkala
- e) pencatatan transaksi penerimaan di SMILE tidak bisa dilakukan karena EP di atasnya (provinsi/kabupaten/Kota) tidak melakukan pencatatan atas distribusi vaksin di SMILE-nya
- f) pencatatan transaksi penerimaan di SMILE tidak bisa dilakukan karena terdapat ketidaksesuaian atas fisik vaksin yang diterima
- g) lainnya (sebutkan)...

Akibatnya (*akibat berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):

- a) Pencatatan vaksin di SMILE tidak dapat diyakini kebenarannya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan distribusi stok oleh Kementerian Kesehatan
- b) ...

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, terutama atas selisih yang tidak dapat dijelaskan telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya oleh Fasyankes sebagai berikut (uraikan rencana tindak lanjut oleh mitra pengawasan):

a) ...

b) ...

b. terdapat transaksi pencatatan penerimaan dan pengeluaran vaksin pada aplikasi SMILE tidak didukung dengan dokumen yang memadai (SBBK atau berita acara)

c) dst

f. Penilaian Capaian Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Menguraikan permasalahan terkait dengan capaian pelaksanaan vaksinasi covid-19 di daerah seperti upaya percepatan vaksinasi primer dan booster, serta upaya pemerataan vaksinasi oleh daerah. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Audit dan rekomendasi”

Temuan terkait hal ini, antara lain:

1) *Target sasaran dalam waktu tahapan vaksinasi yang telah ditetapkan tidak tercapai (Rendahnya capaian vaksinasi atas sasaran vaksinasi tahap primer atau booster)*

2) *vaksinasi di tiap wilayah/kecamatan yang tidak merata*

Contoh penyajian:

Target sasaran dalam waktu tahapan vaksinasi yang telah ditetapkan tidak tercapai (Rendahnya capaian vaksinasi atas sasaran vaksinasi tahap ke- dua)

Dari Hasil Pengawasan, terdapat kondisi capaian vaksinasi atas sasaran vaksinasi dosis kedua masih rendah. Hal ini terlihat dari capaian vaksinasi suntikan kedua per tanggal.... (tanggal cut off pengawasan) baru sebesar..... orang atau sebesar% dari target daerah sebesar..... orang. Capaian ini masih dibawah target nasional dimana sasaran yang mendapat dosis lengkap adalah sebesar 70%.

*Hal ini disebabkan (*penyebab berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):*

a) *Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mempunyai rencana grand*

design percepatan vaksinasi daerah seperti tidak melakukan perhitungan proyeksi pencapaian target daerah, tidak menetapkan target laju vaksinasi harian daerah, dll

b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tidak melakukan pendataan atas sisa target sasaran vaksinasi di wilayahnya

c) Jumlah vaksin untuk dosis 2 kurang karena Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tidak melakukan perhitungan kebutuhan jumlah dan jenis vaksin terkait percepatan vaksinasi dosis 2 di wilayahnya

d) lainnya (sebutkan)...

Akibatnya

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya sebagai berikut (uraikan rencana tindak lanjut oleh mitra pengawasan):

*a) Menetapkan target laju vaksinasi untuk dosis kedua minimal sebesar (**angka didapat dari perhitungan dalam kertas kerja**) suntikan per hari untuk dapat mencapai target 70% suntikan kedua sampai dengan akhir bulan maret 2022*

b) rekomendasi lainnya yang relevan....

g. Penilaian Efisiensi Pelaksanaan Distribusi

Menguraikan permasalahan terkait dengan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan distribusi vaksin dan peralatan pendukung/logistik apakah sudah sesuai dengan prosedur, ketentuan dan efisien. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Auditan dan rekomendasi"

h. Kecukupan Pengendalian Risiko Fraud

Menguraikan permasalahan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengendalikan kemungkinan terjadinya fraud pada pelaksanaan distribusi vaksin dan peralatan pendukung/logistik. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Auditan dan rekomendasi".

8. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bagian ini adalah permasalahan-permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan audit namun tidak masuk dalam kategori suatu temuan hasil audit karena tidak memenuhi unsur-unsur temuan (kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat).

(Temuan lainnya yang tidak ada di TAO).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

**Inspektur
Kabupaten/Kota**

.....

NIP

Daftar Lampiran Laporan

1. Berita Acara Pembahasan Hasil Audit
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik

LOGO/KOP SURAT

APIP PELAKSANA AUDIT FASYANKES

LAPORAN HASIL AUDIT
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 PADA
FASYANKES VERTIKAL/PROVINSI/KAB/KOT.....
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN
DI KABUPATEN/KOTA.....
PROVINSI.....

NOMOR :
TANGGAL : 2021

LOGO/KOP BPKP/APIP K/L/DAERAH
Identitas dan Alamat APIP

Nomor : 2021
 Lampiran : ...
 Hal : Laporan Hasil audit Program Vaksinasi
 Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi
Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)
 pada..... (Fasyankes
 Vertikal/Provinsi/Kabupaten/Kota) di
 Kabupaten/Kota/Provinsi.....

Yth. *(sesuai dengan surat penugasannya)*

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota *(untuk LAP-KODE A2)*
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi *(untuk LAP-KODE B2)*
 3. Pimpinan Fasyankes Vertikal/ Pangdam/Danrem/Danlantamal/
 Danlanud/ Kapolda *(untuk LAP-KODE C1;D1;E1)*
- di

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit Program Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)* pada Fasyankes Vertikal/Provinsi/Kabupaten/Kota/TNI/Polri..... sampai dengan periode di wilayah Kabupaten/Kota..... Provinsi....., dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan audit

Dasar pelaksanaan audit adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. *Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (untuk BPKP);*
- c. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (jika terdapat Juknis yang terbaru/terkini, maka dapat menggunakan juknis tersebut);
- f. Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-472/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Tingkat Daerah;
- g. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-514/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tahap III dan IV bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- h. Keputusan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan nomor KEP- /D2/03/2022 tentang Panduan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2022;
- i. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/423/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); (jika ada Juknis yang terbaru, maka dapat menggunakan juknis yang terbaru/terupdate)
- j. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP/ Inspektur K/L/Daerah..... Nomor ST-..... tanggal Perihal

2. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 telah dilaksanakan melalui tata kelola yang baik dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui.

3. Sasaran dan Ruang Lingkup audit

- a. Sasaran audit adalah menilai auditan telah menjalankan program vaksinasi secara efektif dan efisien dengan memperhatikan ketepatan jumlah, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan administrasi, ketepatan kualitas, dan kecukupan pengendalian risiko *fraud* program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilaksanakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- b. Ruang lingkup audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi.

Pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 Tahun 2021 dilaksanakan dengan mengambil sampel fasyankes sebanyak fasyankes pada Kabupaten/Kota... untuk periode sampai dengan.....

4. Batasan Tanggung Jawab

Auditor hanya bertanggung jawab sebatas simpulan hasil audit. Kebenaran dan validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor sebagai dasar pengambilan simpulan menjadi tanggung jawab manajemen program atau pihak-pihak terkait yang menyampaikan dokumen.

5. Metode Audit

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 adalah:

- a. Perencanaan audit antara lain pemahaman bisnis proses, mitigasi risiko dan penyusunan pedoman audit termasuk penyusunan langkah kerja audit serta penetapan waktu audit.
- b. Penetapan jumlah *sampling* pengujian, analisis terhadap data kuantitatif atas data primer dan data sekunder yang tersedia dan diperoleh dari lembaga/instansi pemerintah termasuk wawancara dengan *stakeholder* serta prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
- c. Audit dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

6. Informasi Umum

- a. **Jumlah Fasyankes yang dilakukan pengawasan vaksinasi**

Menginformasikan jumlah Fasyankes yang diaudit.

Tabel-1

No	Nama Fasyankes	Alamat	Kepala/Pimpinan Fasyankes / NIP
1.	Fasyankes A		
2.	Fasyankes B		
3.	Fasyankes C		
4.	Dst.....		

b. Sasaran Vaksinasi

- 1) Menginformasikan capaian vaksinasi kelompok sasaran vaksinasi secara keseluruhan .
- 2) Data yang disajikan merupakan data dan informasi akumulatif sejak dimulainya kegiatan vaksinasi covid-19 sampai dengan cut off tanggal periode pengawasan
- 3) Kolom (4), (5), dan (6) menginformasikan jumlah sasaran yang berhasil disuntik pada suntikan ke- 1, 2, dan 3 untuk dalam tahap vaksinasi per fasyankes.

Tabel-3

Capaian Vaksinasi

No	Jenis Fasyankes	Kategori Sasaran	Suntikan ke 1	Suntikan ke 2	Suntikan ke 3 (booster)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Fasyankes A	SDM Kesehatan	...Org	...Org	...Org
		Lansia	...Org	...Org	...Org
		Petugas Publik	...Org	...Org	...Org
		Masyarakat rentan dan Umum	...Org	...Org	...Org
		Remaja	...Org	...Org	...Org
		Anak-anak	...Org	...Org	...Org
2.	Fasyankes B		...Org	...Org	...Org
3.	Fasyankes C		...Org	...Org	...Org
4.	dst		...Org	...Org	...Org
Jumlah total			...Org	...Org	...Org

Cantumkan sumber data dan tanggal dan jam cut off pelaporan.

Sumber data = Output aplikasi yang digunakan untuk mencatat pelaksanaan vaksinasi (Aplikasi P-Care).

c. Alokasi dan Realisasi Distribusi dan Penggunaan Vaksin

Pencatatan yang dilakukan pengujian pada EP Fasyankes atas Vaksin program Covid-19 per (tanggal cut off audit)

Pencatatan EP Fasyankes... atas Vaksin program Covid-19 per (*tanggal cut off audit*) 2021 yang dilakukan audit adalah sebagai berikut:

1) Fasyankes A

No	Jenis Vaksin	Total Penerimaan (dosis)	Total Pengembalian Distribusi (dosis)	Total Pembuangan (dosis)	Total Konsumsi (dosis)	Sisa Stok
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Coronavac
2	Astrazeneca
3	Moderna
4	Pfizer
5	Sinopharm (ex hibah UEA)
6	Vaksin program Lainnya
	Total

sumber: Output SMILE level Fasyankes A per tanggal (cut off audit)

2) Fasyankes B

No	Jenis Vaksin	Total Penerimaan (dosis)	Total Pengembalian Distribusi	Total Pembuangan	Total Konsumsi	Sisa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Coronavac
2	Astrazeneca
3	Moderna
4	Pfizer
5	Sinopharm (ex hibah UEA)
6	Vaksin program Lainnya
	Total

sumber: Output SMILE level Fasyankes B per tanggal (cut off audit)

**jumlah tabel disesuaikan dengan jumlah EP Fasyankes yang dilakukan audit*

7. Temuan Hasil audit.

a. Penilaian Ketepatan Sasaran

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan sasaran program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi”. Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

Contoh temuan terkait ketidaktepatan sasaran, antara lain:

- *Terdapat Penolakan Vaksinasi COVID-19 oleh sasaran*
- *Terdapat penyuntikan vaksinasi booster di luar sasaran yang telah ditetapkan*
- *Terdapat penyuntikan booster atas sasaran yang belum memiliki tiket*
- *dst*

b. Penilaian Ketepatan Jumlah

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan jumlah pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi”. Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

Contoh temuan terkait ketidaktepatan Jumlah, antara lain:

- 1) *Jumlah vaksin yang dialokasikan dan didistribusikan tidak cukup memenuhi kebutuhan*
- 2) *Jumlah peralatan pendukung dan logistik tidak memenuhi kebutuhan*
- 3) *Jumlah Vaksinator dan Tenaga Kesehatan lainnya tidak memenuhi kebutuhan vaksinasi*
- 4) *dst*

c. Penilaian Ketepatan Waktu

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan waktu pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit.

Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan

rekomendasi”. Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

Contoh temuan terkait ketidaktepatan waktu antara lain:

- Pelaksanaan vaksinasi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- Terdapat vaksin yang mendekati masa kadaluarsa yang belum dapat didistribusikan/ digunakan
- Distribusi vaksin terlambat.
- Distribusi alat pendukung terlambat
- dst

d. Penilaian Ketepatan Kualitas

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan kualitas pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi”. Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

Contoh temuan terkait ketidaktepatan kualitas antara lain:

- Dokumentasi pemantauan suhu vaksin tidak dilakukan secara konsisten
- Cold chain tempat penyimpanan vaksin covid-19 belum dikalibrasi
- kualitas cold chain tempat penyimpanan vaksin covid-19 tidak memadai
- Penyimpanan vaksin tidak sesuai standar suhu penyimpanan
- Tempat penyimpanan vaksin tidak memiliki genset untukantisipasi kedaruratan atau genset tidak berfungsi optimal
- Jenis peralatan pendukung dan logistik tidak memenuhi kebutuhan
- Dst

Catatan: Jika memungkinkan, Tim audit agar Melakukan koordinasi, klarifikasi dan diskusi dengan BPOM setempat atas hasil audit mengenai ketepatan kualitas.

e. Penilaian Ketepatan Administrasi

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan administrasi pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan

harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi". Temuan audit agar mencantumkan identitas Fasyankes atau membuat daftar fasyankes/temuan jika temuan audit dijumpai pada beberapa fasyankes.

Contoh temuan terkait ketidaktepatan administrasi antara lain:

a. Tidak dilakukan pencatatan vaksin secara elektronik (SMILE) secara tertib

Dari Hasil Stok Opname atas vaksin program di gudang farmasi EP Kabupaten/Kota pada tanggal 2021 (*tanggal dilakukan pemeriksaan fisik persediaan oleh auditor*), terdapat pencatatan vaksin secara elektronik (SMILE) tidak dilakukan secara tertib. Hal ini terlihat dari saldo sisa stok vaksin menurut smile yang berbeda dengan hasil stock opname per tanggal.... yang dapat diuraikan dalam tabel berikut:

No	Jenis Vaksin	Sisa Stok pemeriksaan fisik (dosis)	Sisa Stok menurut SMILE (dosis)	Selisih (3-4) (dosis)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Coronovac
2.	Astrazeneca
3.	Moderna
4.	Pfizer
5.	Sinopharm (ex hibah UEA)
6.	Vaksin program Lainnya
	Total

Kondisi ini tidak sesuai dengan (*sebutkan kriteria yang digunakan*)

Hal ini disebabkan (*penyebab berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):

- h) Jumlah SDM yang terbatas
- i) keterbatasan jaringan internet
- j) tidak dilakukan stok opname secara bulanan/berkala

- k) tidak dilakukan rekonsiliasi antara hasil stok opname fisik dengan SMILE secara berkala
- l) pencatatan transaksi penerimaan di SMILE tidak bisa dilakukan karena EP di atasnya (provinsi/kabupaten/Kota) tidak melakukan pencatatan atas distribusi vaksin di SMILE-nya
- m) pencatatan transaksi penerimaan di SMILE tidak bisa dilakukan karena terdapat ketidaksesuaian atas fisik vaksin yang diterima
- n) lainnya (sebutkan)...

Akibatnya (*akibat berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):

- c) Pencatatan vaksin di SMILE tidak dapat diyakini kebenarannya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan distribusi stok oleh Kementerian Kesehatan

d) ...

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, terutama atas selisih yang tidak dapat dijelaskan telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya oleh Fasyankes sebagai berikut (uraikan rencana tindak lanjut oleh mitra pengawasan):

d) ...

e) ...

b. Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi (P-Care) tidak optimal

Dari pengawasan atas penginputan vaksinasi ke dalam PCARE, terdapat pencatatan hasil vaksinasi secara elektronik (PCARE) tidak dilakukan secara tertib. Hal ini terlihat dari jumlah suntikan yang telah dilakukan oleh Fasyankes yang diuji petik pada laporan manual lebih besar sebanyak suntikan dibanding dengan jumlah suntikan yang telah terinput pada PCARE , yang dapat diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah suntikan audited (suntikan)	Jumlah suntikan/sasaran menurut PCARE (dosis)	Selisih (3) - (4) (dosis)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.	Fasyankes A
2.	Fasyankes B
3.	Fasyankes C
4.	Fasyankes D
5.	dst...
	Total

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

*Hal ini disebabkan (*penyebab berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):*

- a) jumlah SDM yang terbatas
- b) keterbatasan jaringan internet
- c) ...

*Akibatnya (*akibat berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):*

- a) Pencatatan hasil vaksinasi pada P-CARE tidak update yang dapat dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh Kementerian Kesehatan
- b) ...

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, terutama atas selisih yang tidak dapat dijelaskan telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya oleh Fasyankes sebagai berikut (uraikan rencana tindak lanjut oleh mitra pengawasan):

- a. ...
- b. ...
- c. terdapat transaksi pencatatan penerimaan dan pengeluaran vaksin pada aplikasi SMILE tidak didukung dengan dokumen yang memadai (SBBK atau berita acara)
- d. dst

f. Efisiensi Pelaksanaan Vaksinasi

Menguraikan permasalahan terkait dengan penggunaan vaksin, peralatan pendukung dan logistik serta penggunaan anggaran dalam pelaksanaan vaksinasi apakah sudah sesuai dengan prosedur,

ketentuan, dan efisien (penggunaan sumber daya standar dibandingkan output yang diperoleh). Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi

Contoh temuan terkait Efisiensi Pelaksanaan Vaksinasi antara lain:

- Pengambilan, pemakaian dan penyimpanan vaksin oleh tim vaksinasi tidak sesuai ketentuan.
- Pemakaian vaksin melebihi wastage rate yang telah ditetapkan tidak dicatat
- dst

g. Kecukupan Pengendalian Risiko Fraud

Menguraikan permasalahan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal pada masing-masing Fasyankes dalam mengendalikan kemungkinan terjadinya fraud pada pelaksanaan vaksinasi. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi".

Contoh temuan terkait hal ini antara lain terdapat pungutan liar dalam pelaksanaan vaksinasi dan adanya vaksin yang diperjualbelikan untuk keuntungan pribadi.

h. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bagian ini adalah permasalahan-permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan audit namun tidak masuk dalam kategori suatu temuan hasil audit karena tidak memenuhi unsur-unsur temuan (kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat).

(Temuan lainnya yang tidak ada di TAO).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pimpinan APIP Pelaksana Audit di
Fasyankes

.....

NIP

Tembusan Yth:

1. Inspektur Kabupaten/Kota..... (*untuk LAP KODE-A2*)
2. Inspektur Provinsi..... (*untuk LAP KODE-B2*)
3. BPKP Perwakilan Provinsi....(*untuk LAP KODE-D1 dan E1*)
4. Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan, Deputi Polhukam PMK (Khusus Fasyankes TNI/Polri yang diaudit oleh BPKP Perwakilan untuk *LAP KODE-C1*)
5. Irjen K/L/TNI/Irwasum....(*untuk LAP KODE-E1 dan KODE-C1*)

Daftar Lampiran Laporan

1. Berita Acara Pembahasan Hasil Audit
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik

Kode A3

LOGO/KOP

APIP KABUPATEN/KOTA

LAPORAN KOMPILASI HASIL AUDIT
ATAS PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 SE-
KABUPATEN/KOTA.....
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN

NOMOR :
TANGGAL : 2022

LOGO/KOP APIP KABUPATEN/KOTA
Identitas dan Alamat

Nomor : 2021
 Lampiran : ...
 Hal : Laporan Kompilasi Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) se-Kabupaten/Kota..... untuk periode sampai dengan (bulan, tahun)

Yth. Bupati/Walikota.....
 di ...

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kompilasi Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) se-Kabupaten/Kota..... untuk periode sampai dengan (bulan, tahun) berdasarkan Laporan Hasil Audit terlampir (*dibuatkan lampiran daftar Nama Instansi APIP, Nomor dan Tanggal Laporan se-Kabupaten/Kota*), dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan audit

Dasar pelaksanaan audit adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi

- Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* (jika ada Juknis yang terbaru, maka dapat menggunakan juknis yang terbaru/terupdate);
- e. Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-472/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Tingkat Daerah;
 - f. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-514/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tahap III dan IV bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
 - g. Keputusan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan nomor KEP- /D2/03/2022 tentang Panduan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun 2022;
 - h. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/423/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; (jika ada Juknis yang terbaru, maka dapat menggunakan juknis yang terbaru/terupdate)
 - i. Surat Tugas Inspektur Kabupaten/Kota..... Nomor ST- tanggal Januari 2021 perihal

2. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 di Kabupaten/Kota telah dilaksanakan melalui tata kelola yang baik dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui.

3. Sasaran dan ruang lingkup audit

- 1) Sasaran audit adalah menilai auditan telah menjalankan program vaksinasi secara efektif dan efisien dengan memperhatikan ketepatan jumlah, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan administrasi, ketepatan kualitas, dan kecukupan pengendalian risiko *fraud*. Laporan Kompilasi se Kabupaten/Kota memuat hasil pengawasan kegiatan vaksinasi yang telah dilaksanakan pada Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota....., dengan jumlah audit uji petik sebagai berikut:

Tabel-1

No	Jenis Objek Pengawasan	Jumlah	Keterangan
1.	Puskesmas		
2.	RSUD Kab/Kot		
3.	Klinik Swasta		
4.	RS Swasta		
5.	Kegiatan vaksinasi di luar Fasyankes		
6.	Lainnya		

Sumber data: LAP Kode A1, A2, dan A.M.

- 2) Ruang lingkup audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi.
- 3) Pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 tahun 2021 di Kabupaten/Kota ... telah dilaksanakan dengan melibatkan APIP Pemerintah Daerah dan APIP Kementerian/Lembaga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel-2

No	Asal APIP	Jumlah Laporan dukungan yang masuk
1.	Inspektorat Kabupaten/Kota.....	
2.	Inspektorat Provinsi....	
3.	BPKP Perwakilan....	
4.	Itjen K/L/TNI/Irwasum... (dirinci)	
	Jumlah	

Sumber data: Lap KODE-A1, A2, dan A.M

4. Batasan Tanggung Jawab

Auditor hanya bertanggung jawab sebatas simpulan hasil audit. Kebenaran dan validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor sebagai dasar pengambilan simpulan menjadi tanggung jawab manajemen program atau pihak-pihak terkait yang menyampaikan dokumen.

5. Metode audit

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 adalah:

- a. Perencanaan audit antara lain pemahaman bisnis proses, mitigasi risiko dan penyusunan pedoman audit termasuk penyusunan langkah kerja audit serta penetapan waktu audit.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Coronava c
2	Astrazenec a
3	Moderna
4	Pfizer
5	Sinopha rm (ex hibah UEA)
6	Vaksin program Lainnya (sebutk an)
Total	

Sumber data: Lap KODE- A1

4) Target dan Realisasi Sasaran Vaksinasi.

- Menginformasikan capaian vaksinasi kelompok sasaran vaksinasi secara keseluruhan
- Data yang disajikan merupakan data dan informasi akumulatif dari mulainya kegiatan vaksinasi covid-19 sampai dengan cut off tanggal periode pengawasan;
- Kolom (3) menginformasikan jumlah total target sasaran vaksinasi;
- Kolom (4), (6), (8) menginformasikan jumlah sasaran yang berhasil disuntik pada suntikan ke- 1, -2, dan -3;
- Kolom (5), (7), (9) menginformasikan capaian target vaksinasi di kabupaten/kota per kelompok sasaran yang diperoleh dari total sasaran yang divaksin dibanding dengan total target sasaran per periode suntikan;

Tabel-3. Sasaran Vaksinasi: keseluruhan

No	Kategori Sasaran	Total Target Sasaran	Suntikan ke 1		Suntikan ke 2		Suntikan ke 3 (Booster)	
			Jumlah orang	Capaian Target (%)	Jumlah orang	Capaian Target (%)	Jumlah orang	Capaian Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	SDM Kesehatan	...Org	...OrgOrgOrg	...

2.	Lansia	...Org	...OrgOrgOrg	...
3.	Petugas Publik	...Org	...OrgOrgOrg	...
4.	Masyarakat rentan dan Umum	...Org	...OrgOrgOrg	...
5.	Remaja	...Org	...OrgOrgOrg	...
6.	Anak-anak	...Org	...OrgOrgOrg	...
	Jumlah total	...Org	...Org	%	...Org	%	...Org	%

Cantumkan sumber data dan tanggal dan jam cut off pelaporan.

Sumber data = Output Aplikasi satu data vaksinasi atau Aplikasi P-Care/ Lap A1.

7. Temuan audit.

Merupakan integrasi temuan audit dari LAP Kode-A1, A2, dan AM

1) Penilaian ketepatan Sasaran

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan sasaran program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi".

Contoh temuan terkait ketidaktepatan sasaran, antara lain:

- Terdapat Penolakan Vaksinasi COVID-19 oleh sasaran
- Terdapat penyuntikan vaksinasi booster di luar kriteria sasaran yang telah ditetapkan
- Terdapat penyuntikan booster atas sasaran yang belum memiliki tiket
- dst

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Fasyankes, dan kegiatan vaksinasi di luar Fasyankes terdapat kondisi penyuntikan vaksinasi booster di luar kriteria sasaran yang telah ditetapkan sebanyakorang dengan rincian sebagai berikut:

No	Tempat Keterjadian	Jumlah sasaran yang tidak tepat
1	Puskesmas A Orang
2	Puskesmas B Orang
3.	RSUD... Orang
4.	Kegiatan Vaksinasi di luar Fasyakes A Orang

Total Orang
-------	------------

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

- a. ...*
- b. ...*

Akibatnya.....

- a. ...*
- b. ...*

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Fasyankes terkait sebagai berikut:

- a.*
- b.*

2) Penilaian ketepatan Jumlah.

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan jumlah program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi.

Temuan terkait ketidaktepatan jumlah, antara lain

- a. Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan*
- b. Jumlah peralatan pendukung dan logistic tidak memenuhi kebutuhan vaksinasi*
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi*
- d. Jumlah Vaksinator dan Tenaga Kesehatan lainnya tidak memenuhi kebutuhan vaksinasi*
- e. dst*

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Fasyankes, dan kegiatan vaksinasi di luar Fasyankes terdapat penerimaan vaksin yang tidak tepat jumlah sebanyakDosis, dengan rincian sebagai

berikut:

No	Tempat Keterjadian	Jumlah permasalahan
1	Puskesmas A dosis
2	Puskesmas B dosis
3.	RSUD... dosis
4.	Kegiatan Vaksinasi di luar Fasyakes A dosis
	Total dosis

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan atau Fasyankes terkait sebagai berikut:

- a.
- b.

3) Penilaian Ketepatan Waktu

Uraikan permasalahan terkait dengan kesiapan dan kesesuaian jadwal Dinas Kesehatan kabupaten/kota pada kegiatan distribusi vaksin dan logistik yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi".

Contoh temuan terkait ketidaktepatan Waktu, antara lain:

- Pelaksanaan vaksinasi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- Distribusi vaksin terlambat.
- Distribusi alat pendukung terlambat

- Anggaran pendukung vaksinasi terlambat
- Terdapat Penumpukan Vaksin covid-19 di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang tidak segera didistribusikan
- dst

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Penumpukan Vaksin covid-19 di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang tidak segera didistribusikan sebanyakdosis, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Vaksin	Jumlah	Lamanya mengendap (hari)	Kadaluarsa (Expired Date)
1	Coronavac dosis		
2	Astrazeneca dosis		
3.	Moderna dosis		
4.	Pfizer dosis		
5.	Sinopharm (ex hibah UEA) dosis		
6.	Vaksin program Lainnya dosis		
	Total dosis		

*rincian dapat dibuatkan lampiran secara terpisah

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

- ...
- ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait sebagai berikut:

-
-

4) Penilaian Ketepatan Kualitas.

Uraikan permasalahan terkait dengan ketepatan kualitas program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara

jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan audit dan rekomendasi";

Contoh temuan terkait ketidaktepatan Kualitas, antara lain:

- Dokumentasi pemantauan suhu vaksin tidak dilakukan secara konsisten
- Cold chain tempat penyimpanan vaksin covid-19 belum dikalibrasi
- kualitas cold chain tempat penyimpanan vaksin covid-19 tidak memadai
- Penyimpanan vaksin tidak sesuai standar suhu penyimpanan
- Gudang farmasi/Tempat penyimpanan vaksin tidak memiliki genset untukantisipasi kedaruratan atau genset tidak berfungsi optimal
- Jenis peralatan pendukung dan logistic tidak memenuhi kebutuhan
- Pelaksanaan Distribusi oleh Kabupaten Kota tidak sesuai dengan CDOB
- dst

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Fasyankes, dan kegiatan vaksinasi di luar Fasyankes, Ditemukan kualitas cold chain tempat penyimpanan vaksin covid-19 tidak memadai, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tempat Keterjadian (Fasyankes)	Jumlah
1	Gudang Dinas Kesehatan Kab/Kota atau Hub Kabupaten/ Kota unit
2	Puskesmas A unit
3	Puskesmas B unit
4	RSUD... unit
5	Kegiatan Vaksinasi di luar Fasyakes A unit
	Total unit

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Fasyankes terkait sebagai berikut:

- a.
- b.

5) Penilaian Ketepatan Administrasi

Uraikan permasalahan terkait dengan ketepatan administrasi program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, dan rekomendasi

Contoh temuan terkait ketidaktepatan Administrasi, antara lain:

- Tidak dilakukan pencatatan vaksin secara elektronik (SMILE) secara tertib
- Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi (P-Care) tidak optimal
- Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di kabupaten/kota tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
- terdapat transaksi pencatatan penerimaan dan pengeluaran vaksin pada aplikasi SMILE tidak didukung dengan dokumen yang memadai (SBBK atau berita acara)
- dst

Contoh Penyajian:

a. Tidak dilakukan pencatatan vaksin secara elektronik (SMILE) secara tertib

Dari Hasil Stok Opname, terdapat pencatatan vaksin secara elektronik (SMILE) tidak dilakukan secara tertib. Hal ini terlihat dari saldo sisa stok vaksin menurut smile yang berbeda dengan hasil stock opname sebanyak dosis, yang dapat diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Kabupaten/ Kota>Nama Fasyankes	Total Sisa hasil Stok opname fisik (dosis)	Total Sisa hasil Stok SMILE (dosis)	Selisih (3) - (4) (dosis)	Tanggal pengambil an data/tang gal stok

					opname
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dinkes Kab/Kot
2.	Fasyankes A
3.	Fasyankes B
4.	Fasyankes C
5.
6.	Dst
	Total

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan (*penyebab berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):

- a) Jumlah SDM yang terbatas
- b) keterbatasan jaringan internet
- c) tidak dilakukan stock opname secara bulanan/ berkala
- d) tidak dilakukan rekonsiliasi antara hasil stok opname fisik dengan SMILE secara berkala
- e) pencatatan transaksi penerimaan di SMILE tidak bisa dilakukan karena EP di atasnya (provinsi) tidak melakukan pencatatan atas distribusi vaksin di SMILE-nya
- f) pencatatan transaksi penerimaan di SMILE tidak bisa dilakukan karena terdapat ketidaksesuaian atas fisik vaksin yang diterima
- g) lainnya (sebutkan)...

Akibatnya (*akibat berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):

- a) Pencatatan vaksin di SMILE tidak dapat diyakini kebenarannya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan distribusi stok oleh Kementerian Kesehatan
- b) ...

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Fasyankes terkait sebagai berikut:

a.

b.

b. Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi (P-Care) tidak optimal

Dari pengawasan atas penginputan vaksinasi ke dalam PCARE, terdapat pencatatan hasil vaksinasi secara elektronik (PCARE) tidak dilakukan secara tertib. Hal ini terlihat dari jumlah suntikan yang telah dilakukan oleh Fasyankes yang diuji petik pada laporan manual lebih besar sebanyak suntikan dibanding dengan jumlah suntikan yang telah terinput pada P-CARE, yang dapat diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah suntikan audited (suntikan)	Jumlah suntikan/sasaran menurut PCARE (dosis)	Selisih (3) - (4) (dosis)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Fasyankes A
2.	Fasyankes B
3.	Fasyankes C
4.	Fasyankes D
5.	dst...
	Total

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan (*penyebab berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):

- a) jumlah SDM yang terbatas
- b) keterbatasan jaringan internet
- c) ...

Akibatnya (*akibat berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):

- a) Pencatatan hasil vaksinasi pada PCARE tidak update yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh Kementerian Kesehatan

b) ...

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, terutama atas selisih yang tidak dapat dijelaskan telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya oleh Fasyankes sebagai berikut (uraikan rencana tindak lanjut oleh mitra pengawasan):

1) ...

2) ...

6) Penilaian Capaian Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Menguraikan permasalahan terkait dengan capaian pelaksanaan vaksinasi covid-19 di daerah seperti upaya percepatan vaksinasi primer dan booster, serta upaya pemerataan vaksinasi oleh daerah. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Audit dan rekomendasi"

Temuan terkait hal ini, antara lain:

- 1) *Target sasaran dalam waktu tahapan vaksinasi yang telah ditetapkan tidak tercapai (Rendahnya capaian vaksinasi atas sasaran vaksinasi tahap primer atau booster)*
- 2) *vaksinasi di tiap wilayah/kecamatan yang tidak merata*

Contoh penyajian:

Target sasaran dalam waktu tahapan vaksinasi yang telah ditetapkan tidak tercapai (Rendahnya capaian vaksinasi atas sasaran vaksinasi tahap ke- dua)

Dari Hasil Pengawasan, terdapat kondisi capaian vaksinasi atas sasaran vaksinasi dosis kedua masih rendah. Hal ini terlihat dari capaian vaksinasi suntikan kedua per tanggal.... (tanggal cut off pengawasan) baru sebesar..... orang atau sebesar% dari target daerah sebesar..... orang. Capaian ini masih dibawah target nasional dimana sasaran yang mendapat dosis lengkap adalah sebesar 70%.

*Hal ini disebabkan (*penyebab berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):*

- a) *Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mempunyai rencana grand design percepatan vaksinasi daerah seperti tidak melakukan perhitungan*

- proyeksi pencapaian target daerah, tidak menetapkan target laju vaksinasi harian daerah, dll*
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tidak melakukan pendataan atas sisa target sasaran vaksinasi di wilayahnya*
 - c) Jumlah vaksin untuk dosis 2 kurang karena Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tidak melakukan perhitungan kebutuhan jumlah dan jenis vaksin terkait percepatan vaksinasi dosis 2 di wilayahnya*
 - d) lainnya (sebutkan)...*

Akibatnya

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya sebagai berikut (uraikan rencana tindak lanjut oleh mitra pengawasan):

- a) Menetapkan target laju vaksinasi untuk dosis kedua minimal sebesar (**angka didapat dari perhitungan dalam kertas kerja**) suntikan per hari untuk dapat mencapai target 70% suntikan kedua sampai dengan akhir bulan maret 2022*
- b) rekomendasi lainnya yang relevan....*

7) Penilaian efisiensi Pelaksanaan Distribusi dan Vaksinasi

Menguraikan permasalahan terkait dengan penggunaan vaksin, peralatan pendukung dan logistik serta penggunaan anggaran dalam pelaksanaan vaksinasi apakah sudah sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan efisien (penggunaan sumber daya standar dibandingkan output yang diperoleh). Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi

Contoh temuan terkait Efisiensi Pelaksanaan Vaksinasi antara lain:

- Pengambilan, pemakaian dan penyimpanan vaksin oleh tim vaksinasi tidak sesuai ketentuan.*
- Pemakaian vaksin melebihi wastage rate yang telah ditetapkan*

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Fasyankes, dan kegiatan vaksinasi di luar Fasyankes Ditemukan Pemakaian vaksin melebihi wastage rate yang telah ditetapkan, yaitu pada Puskesmas A, Puskesmas B,

Puskesmas C, dst...

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan

- a.*
- b.*

Akibatnya

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Fasyankes terkait sebagai berikut:

- a.*
- b.*

8) Kecukupan Pengendalian Risiko Fraud

Menguraikan permasalahan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengendalikan kemungkinan terjadinya fraud pada pelaksanaan distribusi vaksin dan peralatan pendukung/logistik. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Auditor dan rekomendasi".

Contoh temuan terkait fraud antara lain:

- *Adanya pungutan liar dalam kegiatan vaksinasi.*
- *Terdapat indikasi kuat adanya jual beli vaksin covid-19 program*

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Fasyankes, dan kegiatan vaksinasi di luar Fasyankes Ditemukan Terdapat pungutan liar dalam pelaksanaan vaksinasi, yaitu pada Puskesmas A, Puskesmas B, Puskesmas C, dst...

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

- a. ...*
- b. ...*

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Fasyankes terkait sebagai berikut:

a.

b.

8. Hal – hal yang perlu diperhatikan

Menguraikan permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan audit di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan fasyankes namun tidak masuk dalam kategori suatu temuan hasil audit karena tidak memenuhi atribut temuan audit (kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat) serta Temuan Audit lainnya yang tidak ada di TAO bersumber LAP KODE-A1, LAP KODE-A2, dan LAP KODE-A3

Catatan: Apabila diperlukan dapat diberikan saran/rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk menindaklanjuti hal – hal penting yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu Bupati/Walikota kami ucapkan terima kasih.

**Inspektur
Kabupaten/Kota**

.....
NIP

Tembusan Yth:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi.....(dukungan LAP KODE-C2)
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.....

Daftar Lampiran Laporan

1. Berita Acara Pembahasan Hasil Audit
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik

KODE B1

LOGO/KOP
APIP PROVINSI....

LAPORAN HASIL AUDIT
ATAS PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 PADA
DINAS KESEHATAN PROVINSI.....
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN

NOMOR :
TANGGAL : 2022

LOGO/KOP APIP PROVINSI
Identitas dan Alamat APIP

Nomor : 2022
 Lampiran : ...
 Hal : Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan
 Vaksinasi Dalam Rangka
 Penanggulangan Pandemi *Corona
 Virus Diseases 2019* (COVID-19) pada
 Dinas Kesehatan Provinsi.....
 untuk periode sampai dengan
 (bulan, tahun)

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.....
 di ...

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) pada Dinas Kesehatan Provinsi..... untuk periode sampai dengan, dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan audit

Dasar pelaksanaan audit adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (jika ada Juknis yang terbaru,

- maka dapat menggunakan juknis yang terbaru/terupdate).
- e. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-514/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tahap III dan IV bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - f. Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-472/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Tingkat Daerah;
 - g. Keputusan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan nomor KEP- /D2/03/2022 tentang Panduan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun 2022;
 - h. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/423/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); (jika ada Juknis yang terbaru, maka dapat menggunakan juknis yang terbaru/terupdate)
 - i. Surat Tugas Inspektur Provinsi..... Nomor ST-..... tanggal perihal

2. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 telah dilaksanakan melalui tata kelola yang baik dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui.

3. Sasaran dan ruang lingkup audit

Sasaran audit adalah menilai Dinas Kesehatan Provinsi.... telah menjalankan program vaksinasi kegiatannya secara efektif dan efisien dengan memperhatikan ketepatan Jumlah, ketepatan Sasaran, Ketepatan Waktu, Ketepatan Administrasi, Ketepatan Kualitas, dan kecukupan Pengendalian Risiko Fraud.

Ruang lingkup audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan

pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi untuk periode sampai dengan.....

4. Batasan Tanggung Jawab

Auditor hanya bertanggungjawab sebatas simpulan hasil audit. Kebenaran dan validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor sebagai dasar pengambilan simpulan menjadi tanggungjawab manajemen program atau pihak-pihak terkait yang menyampaikan dokumen.

5. Metodologi audit

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 adalah:

- a. Perencanaan audit antara lain pemahaman bisnis proses, mitigasi risiko dan penyusunan pedoman audit termasuk penyusunan langkah kerja audit serta penetapan waktu audit.
- b. Penetapan jumlah sampling pengujian, analisis terhadap data kuantitatif atas data primer dan data sekunder yang tersedia dan diperoleh dari lembaga/instansi pemerintah termasuk wawancara dengan *stakeholder* serta prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
- c. Audit dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

6. Informasi umum

1) Identitas auditan

Menginformasikan nama dan alamat kantor, dan nama, nomor dan tanggal SK jabatan pimpinan kantor Dinas Kesehatan Provinsi.

2) Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Vaksinasi

- a. *Data yang disajikan merupakan data dan informasi akumulatif dari mulainya awal tahun 2022 sampai dengan cut off tanggal periode pengawasan*
- b. *Menginformasikan sumber dana, pagu anggaran dan realisasi penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi.*
- c. *Anggaran merupakan dukungan dari APBN/APBD (Provinsi)/ Sumber Dana Lainnya untuk pelaksanaan vaksinasi.*

Tabel-1

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%-tase
a)	APBN			
b)	APBD			

c)	Lainnya yang sah			
Jumlah				

3) Pencatatan atas Realisasi distribusi Vaksin Covid-19.

- Data yang disajikan merupakan data dan informasi akumulatif dari mulainya kegiatan vaksinasi covid-19 sampai dengan cut off tanggal periode pengawasan
- Menginformasikan penerimaan dan distribusi vaksin program yang diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan data SMILE Dinas Kesehatan Provinsi.

Tabel-2

No	Jenis Vaksin	Total Penerimaan (dosis)	Penerimaan Pengembalian (dosis)	Total Distribusi (dosis)	Total Pengembalian Distribusi (dosis)	Total Pembuangan (dosis)	Total Konsumsi (dosis)	Sisa (dosis)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Coronavic
2	Astrazeneca
3	Moderna
4	Pfizer
5	Sinopharm (ex hibah UEA)
6	Vaksin program Lainnya
Total	

Sumber data: output SMILE level Dinkes Provinsi... per (tanggal cut off audit)

7. Temuan audit Umum.

1) Penilaian ketepatan Sasaran

- Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan sasaran pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi".
- Contoh temuan terkait ketidaktepatan sasaran, antara lain:
 - Terdapat Penolakan Vaksinasi COVID-19 oleh sasaran

- Terdapat penyuntikan vaksinasi booster di luar kriteria sasaran yang telah ditetapkan
- Terdapat penyuntikan booster atas sasaran yang belum memiliki tiket
- dst

2) Penilaian ketepatan Jumlah.

- a. Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan jumlah pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi".
- b. Contoh temuan terkait ketidaktepatan Jumlah, antara lain:
 - 1) Target jumlah sasaran dalam waktu tahapan vaksinasi yang telah ditetapkan tidak tercapai.
 - 2) Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan
 - 3) Jumlah peralatan pendukung dan logistic tidak memenuhi kebutuhan vaksinasi
 - 4) Pemerintah provinsi tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi
 - 5) dst

3) Penilaian ketepatan Waktu.

- a. Uraikan permasalahan terkait dengan ketepatan waktu pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi".
- b. Contoh temuan terkait ketidaktepatan Waktu, antara lain:
 - Terdapat Penumpukan Vaksin covid-19 di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi yang tidak segera didistribusikan
 - Terdapat vaksin yang mendekati masa kadaluarsa yang belum dapat didistribusikan/ digunakan
 - Distribusi vaksin terlambat.
 - Distribusi alat pendukung terlambat
 - dst

4) Penilaian Ketepatan Kualitas.

- a. Uraikan permasalahan terkait dengan ketepatan kualitas pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit.

Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi”;

- b. *Contoh temuan terkait ketidaktepatan Kualitas, antara lain*
- *Dokumentasi pemantauan suhu vaksin tidak dilakukan secara konsisten*
 - *Cold chain tempat penyimpanan vaksin covid-19 belum dikalibrasi*
 - *kualitas cold chain tempat penyimpanan vaksin covid-19 tidak memadai*
 - *Penyimpanan vaksin tidak sesuai standar suhu penyimpanan*
 - *Gudang farmasi/Tempat penyimpanan vaksin tidak memiliki genset untukantisipasi kedaruratan atau genset tidak berfungsi optimal*
 - *Jenis peralatan pendukung dan logistic tidak memenuhi kebutuhan*
 - *Pelaksanaan Distribusi oleh Kabupaten Kota tidak sesuai dengan CDOB*
 - *dst*
- c. *Diharapkan agar APIP melakukan koordinasi, klarifikasi dan diskusi dengan BPOM setempat atas hasil audit mengenai ketepatan kualitas*

5) Penilaian Ketepatan Administrasi

Uraikan permasalahan terkait dengan ketepatan administrasi pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, dan rekomendasi

Contoh temuan terkait ketidaktepatan Administrasi, antara lain:

- **Tidak dilakukan pencatatan vaksin secara elektronik (SMILE) secara tertib**

Dari Hasil Stok Opname atas vaksin program di gudang farmasi Provinsi pada tanggal 2021 (tanggal dilakukan pemeriksaan fisik persediaan oleh auditor), terdapat pencatatan vaksin secara elektronik (SMILE) tidak dilakukan secara tertib. Hal ini terlihat dari saldo sisa stok vaksin menurut smile yang berbeda dengan hasil stock opname per tanggal..... yang dapat diuraikan dalam tabel berikut:

No	Jenis Vaksin	Sisa Stok menurut SMILE (dosis)	Sisa Stok Pemeriksaan Fisik (dosis)	Selisih (dosis)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Coronavac
2.	Astrazeneca
3.	Moderna
4.	Pfizer
5.	Sinopharm (ex hibah UEA)
6.	Vaksin program Lainnya
	Total

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan (*penyebab berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):

- a) jumlah SDM yang terbatas
- b) keterbatasan jaringan internet
- c) tidak dilakukan stok opname secara bulanan/berkala
- d) tidak dilakukan rekonsiliasi antara hasil stok opname fisik dengan SMILE secara berkala
- e) pencatatan transaksi penerimaan di SMILE tidak bisa dilakukan karena EP di atasnya (pusat) tidak melakukan pencatatan atas distribusi vaksin di SMILE-nya
- f) pencatatan transaksi penerimaan di SMILE tidak bisa dilakukan karena terdapat ketidaksesuaian atas fisik vaksin yang diterima
- g) lainnya (sebutkan)...

Akibatnya (*akibat berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):

- a) Pencatatan vaksin di SMILE tidak dapat diyakini kebenarannya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan distribusi stok oleh Kementerian Kesehatan
- b) ...

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, terutama atas selisih yang tidak dapat dijelaskan telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya oleh Kabupaten/Kota sebagai berikut (uraikan rencana tindak lanjut oleh mitra pengawasan):

a) ...

b) ...

temuan administrasi lainnya:

- *Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi (P-Care) tidak optimal*
- *Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di dinas kesehatan provinsi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku*
- *terdapat transaksi pencatatan penerimaan dan pengeluaran vaksin pada aplikasi SMILE tidak didukung dengan dokumen yang memadai (SBBK atau berita acara)*
- *dst*

6) Hal – hal yang perlu diperhatikan.

Menguraikan permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan audit di Dinas Kesehatan Provinsi namun tidak masuk dalam kategori suatu temuan hasil audit karena tidak memenuhi atribut temuan audit (kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat) serta temuan Audit lainnya yang tidak ada di TAO.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Inspektur Provinsi

.....

NIP

Daftar Lampiran Laporan

1. Berita Acara Pembahasan Hasil Audit
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik

LOGO/KOP
APIP PROVINSI

LAPORAN KOMPILASI HASIL AUDIT
ATAS PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 PADA
PROVINSI..... UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN
.....

NOMOR :
TANGGAL : 2021

LOGO/KOP APIP PROVINSI
Identitas dan Alamat

Nomor : 2022
 Lampiran : ...
 Hal : Laporan Kompilasi Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) pada Provinsi..... untuk periode sampai dengan (bulan, tahun)

Yth. Gubernur.....
 di ...

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kompilasi Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) pada Provinsi..... untuk periode sampai dengan (*tanggal cut off*) berdasarkan Laporan Hasil Audit terlampir (*dibuatkan lampiran daftar Nama Instansi APIP, Nomor dan Tanggal Laporan*), dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan audit

Dasar pelaksanaan audit adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi

- Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (jika ada Juknis yang terbaru, maka dapat menggunakan juknis yang terbaru/terupdate);
- e. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-514/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tahap III dan IV bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - f. Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-472/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Tingkat Daerah;
 - g. Keputusan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan nomor KEP- /D2/03/2022 tentang Panduan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2022;
 - h. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/423/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); (jika ada Juknis yang terbaru, maka dapat menggunakan juknis yang terbaru/terupdate)
 - i. Surat Tugas Inspektur Provinsi..... Nomor ST-..... tanggal Januari 2021 perihal

2. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 di Provinsi.... telah dilaksanakan melalui tata kelola yang baik dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui.

3. Sasaran dan ruang lingkup audit

- 1) Sasaran audit adalah menilai audit telah menjalankan program vaksinasi kegiatannya secara efektif dan efisien dengan memperhatikan ketepatan Jumlah, ketepatan Sasaran, Ketepatan Waktu, Ketepatan Administrasi, Ketepatan Kualitas, dan kecukupan Pengendalian Risiko Fraud. Laporan Kompilasi Provinsi memuat hasil pengawasan kegiatan vaksinasi yang telah dilaksanakan pada Dinas Kesehatan

Provinsi....., dengan jumlah audit uji petik sebagai berikut:

Tabel-1

No	Jenis Objek Pengawasan	Jumlah	Keterangan
1.	RSUD Provinsi A		
2.	RSUD Provinsi B		
3.	Fasyankes Lainnya		
4.	Kegiatan a (vaksinasi di luar fasyankes di bawah Pemerintah Provinsi)		
5.	Lainnya		

Sumber data: LAP Kode B1, B2, dan B.M.

- 2) Ruang lingkup audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi.
- 3) Pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 tahun 2021 di Provinsi telah dilaksanakan dengan melibatkan APIP Pemerintah Provinsi dan APIP Kementerian/Lembaga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel-2

No	Asal APIP	Jumlah Laporan dukungan yang masuk
1.	<i>Inspektorat Provinsi</i>	
2.	<i>Itjen KL/TNI/Irwasum</i>	
3.	<i>BPKP Perwakilan</i>	
4.	<i>Itjen K/L/TNI/Irwasum... (dirinci)</i>	
	<i>Jumlah</i>	

Sumber data Lap KODE-B1, B2, dan B.M

4. Batasan Tanggung Jawab

Auditor hanya bertanggungjawab sebatas simpulan hasil audit. Kebenaran dan validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor sebagai dasar pengambalian simpulan menjadi tanggungjawab manajemen program atau pihak-pihak terkait yang menyampaikan dokumen.

5. Metodologi audit

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 adalah:

- a. Perencanaan audit antara lain pemahaman bisnis proses, mitigasi risiko dan penyusunan pedoman audit termasuk penyusunan langkah kerja audit serta penetapan waktu audit.

					(dosis)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Coronavac
2	Astrazeneca
3	Moderna
4	Pfizer
5	Sinopharm (ex hibah UEA)
6	Vaksin program Lainnya
	Total

Sumber data Lap KODE-B1

7. Temuan audit.

Merupakan integrasi temuan audit dari LAP Kode-B1, B2, dan BM.

1) Penilaian ketepatan Sasaran

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan sasaran program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi".

Contoh temuan terkait ketidaktepatan sasaran, antara lain:

- *Terdapat Penolakan Vaksinasi COVID-19 oleh sasaran*
- *Terdapat penyuntikan vaksinasi booster di luar kriteria sasaran yang telah ditetapkan*
- *Terdapat penyuntikan booster atas sasaran yang belum memiliki tiket*
- *dst*

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Fasyankes, dan kegiatan vaksinasi di luar Fasyankes terdapat kondisi penyuntikan vaksinasi booster di luar kriteria sasaran yang telah ditetapkan sebanyakorang dengan rincian sebagai berikut:

No	Tempat Keterjadian	Jumlah sasaran yang tidak tepat
1.	RSUD... Orang

2.	<i>Kegiatan Vaksinasi di luar Fasyankes A</i>	<i>..... Orang</i>
3.	<i>Kegiatan Vaksinasi di luar Fasyankes A</i>	<i>..... Orang</i>
	<i>Total</i>	<i>.... Orang</i>

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

a. ...

b. ...

Akibatnya.....

a. ...

b. ...

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan/ atau Fasyankes terkait sebagai berikut:

a.

b.

2) Penilaian ketepatan Jumlah.

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan jumlah program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi.

Contoh temuan terkait ketidaktepatan Jumlah, antara lain:

- 1) Target jumlah sasaran dalam waktu tahapan vaksinasi yang telah ditetapkan tidak tercapai.*
- 2) Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan*
- 3) Jumlah peralatan pendukung dan logistic tidak memenuhi kebutuhan vaksinasi*
- 4) Pemerintah provinsi tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi*
- 5) dst*

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi, Fasyankes, dan kegiatan

vaksinasi di luar Fasyankes terdapat penerimaan vaksin yang tidak tepat jumlah/kebutuhan sebanyakDosis, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tempat Keterjadian	Jumlah permasalahan
1.	RSUD... dosis
2.	Kegiatan Vaksinasi di luar Fasyakes A dosis
	Total dosis

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan atau Fasyankes terkait sebagai berikut:

- a.
- b.

3) Penilaian Ketepatan Waktu

Uraikan permasalahan terkait dengan kesiapan dan kesesuaian jadwal dinkes Kesehatan Provinsi pada kegiatan distribusi vaksin dan logistik yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi".

Contoh temuan terkait ketidaktepatan Waktu, antara lain:

- Pelaksanaan vaksinasi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- Distribusi vaksin terlambat.
- Distribusi alat pendukung terlambat
- Anggaran pendukung vaksinasi terlambat
- Terdapat Penumpukan Vaksin covid-19 di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi yang tidak segera didistribusikan.
- Dst

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi, Penumpukan Vaksin covid-

19 di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi yang tidak segera didistribusikan sebanyakdosis, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Vaksin	Jumlah	Lamanya mengendap (hari)	Kadaluarsa (Expired Date)
1	Coronavac dosis		
2	Astrazeneca dosis		
3.	Moderna dosis		
4.	Pfizer dosis		
5.	Sinopharm (ex hibah UEA) dosis		
6.	Vaksin program Lainnya dosis		
	Total dosis		

*rincian dapat dibuatkan lampiran secara terpisah

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan provinsi sebagai berikut:

- a.
- b.

4) Penilaian Ketepatan Kualitas.

Uraikan permasalahan terkait dengan ketepatan kualitas program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi";

Contoh temuan terkait ketidaktepatan Kualitas, antara lain:

- Dokumentasi pemantauan suhu vaksin tidak dilakukan secara konsisten
- Cold chain tempat penyimpanan vaksin covid-19 belum dikalibrasi
- kualitas cold chain tempat penyimpanan vaksin covid-19 tidak

memadai

- Penyimpanan vaksin tidak sesuai standar suhu penyimpanan
- Gudang farmasi/Tempat penyimpanan vaksin tidak memiliki genset untukantisipasi kedaruratan atau genset tidak berfungsi optimal
- Jenis peralatan pendukung dan logistic tidak memenuhi kebutuhan
- Pelaksanaan Distribusi oleh Kabupaten Kota tidak sesuai dengan CDOB
- dst

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi, Fasyankes, dan kegiatan vaksinasi di luar Fasyankes, Ditemukan kualitas cold chain tempat penyimpanan vaksin covid-19 tidak memadai, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tempat Keterjadian (Fasyankes)	Jumlah
1	Gudang Dinas Kesehatan Provinsi Unit
2	RSUD... Unit
3	Kegiatan Vaksinasi di luar Fasyakes A Unit
	Total Unit

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan/ atau Fasyankes terkait sebagai berikut:

- a.
- b.

5) Penilaian Ketepatan Administrasi

Uraikan permasalahan terkait dengan ketepatan administrasi program

vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, dan rekomendasi

Contoh temuan terkait ketidaktepatan Administrasi, antara lain:

- Tidak dilakukan pencatatan vaksin secara elektronik (SMILE) secara tertib
- Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi (P-Care) tidak optimal
- Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di kabupaten/kota tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
- terdapat transaksi pencatatan penerimaan dan pengeluaran vaksin pada aplikasi SMILE tidak didukung dengan dokumen yang memadai (SBBK atau berita acara)
- dst

Contoh Penyajian:

a. Tidak dilakukan pencatatan vaksin secara elektronik (SMILE) secara tertib

Dari Hasil Stok Opname, terdapat pencatatan vaksin secara elektronik (SMILE) tidak dilakukan secara tertib. Hal ini terlihat dari saldo sisa stok vaksin menurut smile yang berbeda dengan hasil stock opname sebanyak dosis, yang dapat diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Provinsi/Na ma Fasyankes	Total Sisa Stok Audited (dosis)	Total Sisa Stok menurut SMILE (dosis)	Selisih (3) - (4) (dosis)	Tanggal pengambil an data/tang gal stok opname
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dinkes Provinsi....
2.	Fasyankes A
3.	Fasyankes B
4.	Fasyankes C
5.
6.	Dst
	Total

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan (*penyebab berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):

- a) jumlah SDM yang terbatas
- b) keterbatasan jaringan internet
- c) tidak dilakukan stok opname secara bulanan/berkala
- d) tidak dilakukan rekonsiliasi antara hasil stok opname fisik dengan SMILE secara berkala
- e) pencatatan transaksi penerimaan di SMILE tidak bisa dilakukan karena EP di atasnya (pusat) tidak melakukan pencatatan atas distribusi vaksin di SMILE-nya
- f) pencatatan transaksi penerimaan di SMILE tidak bisa dilakukan karena terdapat ketidaksesuaian atas fisik vaksin yang diterima
- g) lainnya (sebutkan)...

Akibatnya (*akibat berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):

- a) Pencatatan vaksin di SMILE tidak dapat diyakini kebenarannya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan distribusi stok oleh Kementerian Kesehatan
- b) ...

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Fasyankes terkait sebagai berikut:

- a.
- b.

b. Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi (P-Care) tidak optimal

Dari pengawasan atas penginputan vaksinasi ke dalam PCARE, terdapat pencatatan hasil vaksinasi secara elektronik (PCARE) tidak dilakukan secara tertib. Hal ini terlihat dari jumlah suntikan yang telah dilakukan oleh Fasyankes yang diuji petik pada laporan manual lebih besar sebanyak suntikan dibanding dengan jumlah suntikan yang telah terinput pada PCARE , yang dapat diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah suntikan audited (suntikan)	Jumlah suntikan/sasaran menurut PCARE (dosis)	Selisih (3) - (4) (dosis)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Fasyankes A
2.	Fasyankes B
3.	Fasyankes C
4.	Fasyankes D
5.	dst...
	Total

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan (*penyebab berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):

- a) jumlah SDM yang terbatas
- b) keterbatasan jaringan internet
- c) ...

Akibatnya (*akibat berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):

- a) Pencatatan hasil vaksinasi pada PCARE tidak update yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh Kementerian Kesehatan
- b) ...

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, terutama atas selisih yang tidak dapat dijelaskan telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya oleh Fasyankes sebagai berikut (uraikan rencana tindak lanjut oleh mitra pengawasan):

- 3) ...
- 4) ...

5) Penilaian efisiensi Pelaksanaan Distribusi dan Vaksinasi

Menguraikan permasalahan terkait dengan penggunaan vaksin, peralatan pendukung dan logistik serta penggunaan anggaran dalam

pelaksanaan vaksinasi apakah sudah sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan efisien (penggunaan sumber daya standar dibandingkan output yang diperoleh). Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi

Contoh temuan terkait Efisiensi Pelaksanaan Vaksinasi antara lain:

- Pengambilan, pemakaian dan penyimpanan vaksin oleh tim vaksinasi tidak sesuai ketentuan.
- Pemakaian vaksin melebihi wastage rate yang telah ditetapkan

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi, Fasyankes, dan kegiatan vaksinasi di luar Fasyankes Ditemukan Pemakaian vaksin melebihi wastage rate yang telah ditetapkan, yaitu pada RSUD A, RSUD B, dst...

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

a. ...

b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Fasyankes terkait sebagai berikut:

a.

b.

6) Kecukupan Pengendalian Risiko Fraud

Menguraikan permasalahan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal pada Dinas Kesehatan Provinsi dalam mengendalikan kemungkinan terjadinya fraud pada pelaksanaan distribusi vaksin dan peralatan pendukung/logistik. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Auditor dan rekomendasi".

Contoh temuan terkait fraud antara lain:

- Adanya pungutan liar dalam kegiatan vaksinasi.
- Terdapat indikasi kuat adanya jual beli vaksin covid-19 program

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi, Fasyankes, dan kegiatan

vaksinasi di luar Fasyankes Ditemukan pungutan liar dalam pelaksanaan vaksinasi, yaitu pada RSUD A, RSUD B, dst...

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

- a. ...*
- b. ...*

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Fasyankes terkait sebagai berikut:

- a.*
- b.*

9. Hal – hal yang perlu diperhatikan

Menguraikan permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan audit di Dinas Kesehatan Provinsi dan fasyankes namun tidak masuk dalam kategori suatu temuan hasil audit karena tidak memenuhi atribut temuan audit (kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat) serta Temuan Audit lainnya yang tidak ada di TAO bersumber LAP KODE-B1, LAP KODE-B2, dan LAP KODE-BM

Catatan: Apabila diperlukan dapat diberikan saran/rekomendasi kepada Gubernur untuk menindaklanjuti hal – hal penting yang menjadi kewenangan Gubernur.

Demikian kami disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu Gubernur diucapkan terima kasih.

Inspektur Provinsi

.....

NIP

Tembusan Yth:

- 1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- 2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi.....(dukungan LAP KODE-C2)
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.....

LOGO/KOP

BPKP PERWAKILAN PROVINSI

LAPORAN KOMPILASI HASIL AUDIT
ATAS PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 SE-
PROVINSI.....
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN

NOMOR :
TANGGAL : 2022

LOGO/KOP BPKP PERWAKILAN PROVINSI
Identitas dan Alamat APIP

Nomor : 2022
Lampiran : ...
Hal : Laporan Kompilasi Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) se-Provinsi..... untuk periode sampai dengan (bulan, tahun)

Yth. Gubernur....
di ...

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kompilasi Hasil Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) se-Provinsi..... untuk periode sampai dengan (bulan, tahun) berdasarkan Laporan Hasil Audit terlampir (*dibuatkan lampiran daftar Nama Instansi APIP, Nomor dan Tanggal Laporan se-Provinsi*), dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan audit

Dasar pelaksanaan audit adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Petunjuk

- Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (jika ada Juknis yang terbaru, maka dapat menggunakan juknis yang terbaru/terupdate);
- f. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-514/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tahap III dan IV bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - g. Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-472/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Tingkat Daerah;
 - h. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/423/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); (jika ada Juknis yang terbaru, maka dapat menggunakan juknis yang terbaru/terupdate)
 - i. Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Provinsi..... Nomor ST-..... tanggal perihal

2. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, alokasi dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 se provinsi.... telah dilaksanakan melalui tata kelola yang baik dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui.

3. Sasaran dan ruang lingkup audit

- 1) Sasaran audit adalah menilai auditan telah menjalankan program vaksinasi kegiatannya secara efektif dan efisien dengan memperhatikan ketepatan Jumlah, ketepatan Sasaran, Ketepatan Waktu, Ketepatan Administrasi, Ketepatan Kualitas, dan kecukupan Pengendalian Risiko Fraud. Laporan Kompilasi se Provinsi memuat hasil pengawasan kegiatan vaksinasi yang telah dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Fasyankes yang dilakukan uji petik, dan Kegiatan vaksinasi di luar fasyankes yang dilakukan uji petik di wilayah provinsi....
- 2) Ruang lingkup audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan

pandemi COVID-19 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, alokasi, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya, serta Monitoring dan Evaluasi kegiatan vaksinasi.

- 3) Pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 tahun 2021 se-Provinsi.... telah dilaksanakan dengan melibatkan APIP Pemerintah Daerah dan APIP Kementerian/Lembaga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel-1

No	Asal APIP	Jumlah Auditor	Jumlah HP
1.	BPKP Pusat (Kode-E1, EM)		
2.	Itjen K/L/TNI/Itwasum/Itdam/itwasda (Kode-D1, DM)		
3.	BPKP Perwakilan (Kode-C1, CM)		
4.	Kompilasi Inspektorat Provinsi (B3)		
5.	Kompilasi Inspektorat Kabupaten/Kota (A3)		
	Jumlah		

Sumber data Lap KODE A3, B3, C1, CM, D1, DM, E1, dan EM, **rincian terlampir**

4. Batasan Tanggung Jawab

Auditor hanya bertanggungjawab sebatas simpulan hasil audit. Kebenaran dan validitas dokumen yang disampaikan kepada auditor sebagai dasar pengambilan simpulan menjadi tanggungjawab manajemen program atau pihak-pihak terkait yang menyampaikan dokumen.

5. Metodologi audit

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan audit program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 adalah:

- a. Perencanaan audit antara lain pemahaman bisnis proses, mitigasi risiko dan penyusunan pedoman audit termasuk penyusunan langkah kerja audit serta penetapan waktu audit.
- b. Penetapan jumlah sampling pengujian, analisis terhadap data kuantitatif atas data primer dan data sekunder yang tersedia dan diperoleh dari lembaga/instansi pemerintah termasuk wawancara dengan *stakeholder* serta prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
- c. Audit dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

6. Informasi umum

1) Identitas auditan

Menginformasikan jumlah dan jenis auditan (Dinas Kesehatan Provinsi, Dinkes Kabupaten/Kota, Fasyankes Vertikal, Fasyankes Provinsi, dan Fasyankes Kabupaten) sesuai laporan hasil audit yang dikompilasi.

Tabel-2

No	Jenis Fasyankes	Jumlah	Keterangan
a)	Dinas Kesehatan Provinsi...	1	
b)	Dinas Kesehatan Kab/Kota	...	
c)	Puskesmas		
d)	Rumah Sakit *)		
e)	Klinik *)		
f)	KKP		
g)	Kegiatan vaksinasi di luar Fasyankes *)		
g)	Lainnya		

Sumber data: Lap KODE A3, B3, C1, CM, D1, DM, E1, dan EM, **Rincian terlampir**

Ket: *) termasuk data TNI/Polri

2) Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Vaksinasi

- Data yang disajikan merupakan data dan informasi akumulatif dari mulainya awal tahun 2022 sampai dengan cut off tanggal periode pengawasan.
- Menginformasikan sumber anggaran, pagu anggaran dan realisasi penggunaan anggaran pelaksanaan vaksinasi se-Provinsi.

Tabel-3

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%-tase
a)	APBN			
b)	APBD			
c)	Lainnya (BLU)			
	Jumlah			

Sumber data: Lap KODE A3 dan B3

3) Alokasi dan Realisasi distribusi Vaksin Covid-19.

- Data yang disajikan merupakan data dan informasi akumulatif dari mulainya kegiatan vaksinasi covid-19 sampai dengan cut off tanggal periode pengawasan;
- Menginformasikan penerimaan dan distribusi vaksin program dari

5	Sinopharm (ex hibah UEA)
6	Vaksin program Lainnya
Total	

Sumber data: Agregasi (penjumlahan) dari data umum Lap Kabupaten/kota - output SMILE Dinkes Kako se-Provinsi... per (tanggal cut off audit)/ agregasi Lap A3, Rincian per kabupaten/kota terlampir

c. Alokasi dan Realisasi distribusi Vaksin Covid-19 di EP – Fasyankes atas Vaksin program Covid-19 per (tanggal cut off audit)

Tabel-4.c

No	Jenis Vaksin	Total Penerimaan (dosis)	Total Pengembalian Distribusi (dosis)	Total Pembuangan (dosis)	Total Konsumsi (dosis)	Sisa (dosis)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Coronavirus
2	Astrazencana
3	Moderna
4	Pfizer
5	Sinopharm (ex hibah UEA)
6	Vaksin program Lainnya
Total	

Sumber data: Agregasi (penjumlahan) dari data umum Lap Kabupaten/kota/Provinsi - output SMILE Fasyankes se-Provinsi... per (tanggal cut off audit)/ agregasi Lap A3 dan B3, Rincian terlampir

4) Target dan Realisasi Sasaran Vaksinasi.

- a. Menginformasikan capaian vaksinasi kelompok sasaran vaksinasi secara keseluruhan
- b. Data yang disajikan merupakan data dan informasi akumulatif dari mulainya kegiatan vaksinasi covid-19 sampai dengan cut off tanggal periode pengawasan;

- c. Kolom (3) menginformasikan jumlah total target sasaran vaksinasi;
- d. Kolom (4), (6), (8) menginformasikan jumlah sasaran yang berhasil disuntik pada suntikan ke- 1, -2, dan -3;
- e. Kolom (5), (7), (9) menginformasikan capaian target vaksinasi di kabupaten/kota per kelompok sasaran yang diperoleh dari total sasaran yang divaksin dibanding dengan total target sasaran per periode suntikan;

Tabel-5 Sasaran Vaksinasi: keseluruhan

No	Kategori Sasaran	Total Target Sasaran	Suntikan ke 1		Suntikan ke 2		Suntikan ke 3	
			Jumlah orang	Capaian Target (%)	Jumlah orang	Capaian Target (%)	Jumlah orang	Capaian Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	SDM Kesehatan	...Org	...OrgOrgOrg	...
2.	Lansia	...Org	...OrgOrgOrg	...
3.	Petugas Publik	...Org	...OrgOrgOrg	...
4.	Masyarakat rentan dan Umum	...Org	...OrgOrgOrg	...
5.	Remaja	...Org	...OrgOrgOrg	...
6.	Anak-anak	...Org	...OrgOrgOrg	...
Jumlah total		...Org	...Org	%	...Org	%	...Org	%

Cantumkan sumber data dan tanggal dan jam cut off pelaporan.

Sumber data = Output Aplikasi satu data vaksinasi atau Aplikasi P-Care/ Lap A3 dan B3.

7. Temuan audit.

Merupakan resume integrasi temuan audit dari Lap KODE A3, B3, C1, CM, D1, DM, E1, dan EM.

1) Penilaian ketepatan Sasaran

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan sasaran program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi".

Contoh temuan terkait ketidaktepatan sasaran, antara lain:

- Terdapat Penolakan Vaksinasi COVID-19 oleh sasaran
- Terdapat penyuntikan vaksinasi booster di luar kriteria sasaran yang telah ditetapkan

- Terdapat penyuntikan booster atas sasaran yang belum memiliki tiket
- dst

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Fasyankes, dan kegiatan vaksinasi di luar Fasyankes terdapat kondisi Terdapat Penolakan Vaksinasi COVID-19 oleh sasaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Tempat Keterjadian	Jumlah sasaran yang menolak dilakukan vaksinasi
1	Kabupaten A Orang
2	Kabupaten B Orang
3.	Kota A Orang
	Total Orang

*Jika dimungkinkan agar membuat lampiran atas kondisi temuan audit yang lebih rinci yang terjadi pada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, per fasyankes, dan per kegiatan vaksinasi di luar fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

a. ...

b. ...

Akibatnya.....

a. ...

b. ...

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Fasyankes terkait sebagai berikut:

a.

b.

2) Penilaian ketepatan Jumlah.

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan jumlah program

vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi.

Temuan terkait ketidaktepatan Jumlah, antara lain:

- 1) Jumlah vaksin COVID-19 yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan
- 2) Jumlah peralatan pendukung dan logistic tidak memenuhi kebutuhan vaksinasi
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mempunyai dana dukungan vaksinasi
- 4) Jumlah Vaksinator dan Tenaga Kesehatan lainnya tidak memenuhi kebutuhan vaksinasi
- 5) dst

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota terdapat penerimaan vaksin yang tidak tepat jumlah sebanyakDosis, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tempat Keterjadian	Jumlah
1	Kabupaten A dosis
2	Kabupaten B dosis
3.	Kota A dosis
	Total dosis

*Jika dimungkinkan agar membuat lampiran atas kondisi temuan audit yang lebih rinci yang terjadi pada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, per fasyankes, dan per kegiatan vaksinasi di luar fasyankes yang telah dilakukan uji petik.

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan

rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Fasyankes terkait sebagai berikut:

- a.
- b.

3) Penilaian Ketepatan Waktu

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan waktu program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi".

Contoh temuan terkait ketidaktepatan Waktu, antara lain:

- Pelaksanaan vaksinasi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- Distribusi vaksin terlambat.
- Distribusi alat pendukung terlambat
- Anggaran pendukung vaksinasi terlambat
- Terdapat Penumpukan Vaksin covid-19 di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak segera didistribusikan
- dst

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Penumpukan Vaksin covid-19 di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak segera didistribusikan sebanyakdosis, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kabupaten/ Kota/ Provinsi	Jumlah	Rata2 Lamanya mengendap (hari)
1	Provinsi A dosis	
2	Kabupaten A dosis	
3.	Kabupaten B dosis	
4.	Kota A dosis	
	Total dosis	

* agar membuat lampiran atas kondisi temuan audit yang lebih rinci yang

terjadi pada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, per fasyankes, dan per kegiatan vaksinasi di luar fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

a. ...

b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Fasyankes terkait sebagai berikut:

a.

b.

4) Penilaian Ketepatan Kualitas.

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan kualitas program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi";

Contoh temuan terkait ketidaktepatan Kualitas, antara lain:

- Dokumentasi pemantauan suhu vaksin tidak dilakukan secara konsisten
- Cold chain tempat penyimpanan vaksin covid-19 belum dikalibrasi
- kualitas cold chain tempat penyimpanan vaksin covid-19 tidak memadai
- Penyimpanan vaksin tidak sesuai standar suhu penyimpanan
- Gudang farmasi/Tempat penyimpanan vaksin tidak memiliki genset untukantisipasi kedaruratan atau genset tidak berfungsi optimal
- Jenis peralatan pendukung dan logistic tidak memenuhi kebutuhan
- Pelaksanaan Distribusi oleh Kabupaten Kota tidak sesuai dengan CDOB
- dst

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Fasyankes, dan

kegiatan vaksinasi di luar Fasyankes, Ditemukan kualitas cold chain tempat penyimpanan vaksin covid-19 tidak memadai, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tempat Keterjadian	Jumlah Sasaran
1	Kabupaten A unit
2	Kabupaten B unit
3	Kota A unit
	Total unit

*Jika dimungkinkan agar membuat lampiran atas kondisi temuan audit yang lebih rinci yang terjadi pada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, per fasyankes, dan per kegiatan vaksinasi di luar fasyankes yang telah dilakukan uji petik

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Fasyankes terkait sebagai berikut:

- a.
- b.

5) Penilaian Ketepatan Administrasi

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan Administrasi program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, dan rekomendasi

Contoh temuan terkait ketidaktepatan Administrasi, antara lain:

- Tidak dilakukan pencatatan vaksin secara elektronik (SMILE) secara tertib
- Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi (P-Care) tidak optimal

- *Pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kegiatan vaksinasi di Provinsi/kabupaten/kota tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku*
- *terdapat transaksi pencatatan penerimaan dan pengeluaran vaksin pada aplikasi SMILE tidak didukung dengan dokumen yang memadai (SBBK atau berita acara)*
- *Dst*

Contoh Penyajian:

a. Tidak dilakukan pencatatan vaksin secara elektronik (SMILE) secara tertib

Dari Hasil Stok Opname dalam masa audit, terdapat pencatatan vaksin secara elektronik (SMILE) tidak dilakukan secara tertib. Hal ini terlihat dari saldo sisa stok vaksin menurut smile yang berbeda dengan hasil stock opname sebanyak dosis, yang dapat diuraikan dalam tabel berikut

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Total Sisa hasil Stok opname fisik (dosis)	Total Sisa Stok menurut SMILE (dosis)	Selisih (3) - (4) (dosis)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dinkes Provinsi
2.	Agregasi Fasyankes Provinsi.... yang dilakukan sampling audit
3.	Dinkes Kab/Kot A
4.	Agregasi Fasyankes Kabupaten/ Kota A yang dilakukan sampling audit
5.	Dinkes Kab/Kot B
6.	Agregasi Fasyankes Kabupaten/ Kota B yang

	dilakukan sampling audit			
7	dst...			
	Total

* Termasuk Persediaan vaksin TNI/Polri

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan (*penyebab berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):

No	Rincian Penyebab	Jumlah Kejadian (sebutkan jumlah dan lokasi kab/kotanya)
1.	Entitas tidak melakukan stok opname secara berkala	5 lokasi yaitu di Kabupaten A, B, C, dst
2.	Tidak dilakukan rekonsiliasi secara berkala antara hasil stock opname dengan SMILE	5 lokasi yaitu di Kabupaten A, B, C, dst
3.	Jumlah SDM terbatas	5 lokasi yaitu di Kabupaten A, B, C, dst
4.	Keterbatasan jaringan internet	5 lokasi yaitu di Kabupaten A, B, C, dst
5.	pencatatan transaksi penerimaan di SMILE tidak bisa dilakukan karena EP di atasnya tidak melakukan pencatatan atas distribusi vaksin di SMILE-nya	
6	pencatatan transaksi penerimaan di SMILE tidak bisa dilakukan karena terdapat ketidaksesuaian atas fisik vaksin yang diterima	
7	lainnya (sebutkan)....	

Akibatnya (*akibat berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):

- a) Pencatatan vaksin di SMILE tidak dapat diyakini kebenarannya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan distribusi stok oleh Kementerian Kesehatan
- b) ...

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/atau Fasyankes terkait sebagai berikut:

- a.
- b.

b. Pelaporan kegiatan vaksinasi melalui aplikasi (P-Care) tidak optimal

Dari pengawasan atas penginputan vaksinasi ke dalam PCARE, terdapat pencatatan hasil vaksinasi secara elektronik (PCARE) tidak dilakukan secara tertib. Hal ini terlihat dari jumlah suntikan yang telah dilakukan oleh Fasyankes yang diuji petik pada laporan manual lebih besar sebanyak suntikan dibanding dengan jumlah suntikan yang telah terinput pada PCARE (data agregasi jumlah temuan dari A3/B3), yang dapat diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah suntikan audited (suntikan)	Jumlah suntikan/sasaran menurut PCARE (dosis)	Selisih (3) - (4) (dosis)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Agregasi Fasyankes Provinsi.... yang dilakukan sampling audit
2.	Agregasi Fasyankes Kabupaten/Kota A yang dilakukan sampling audit
3.	Agregasi

	Fasyankes Kabupaten/ Kota B yang dilakukan sampling audit			
4.	Agregasi Fasyankes Kabupaten/ Kota A yang dilakukan sampling audit
5.	dst...
	Total

* Termasuk vaksinasi oleh TNI/Polri

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

*Hal ini disebabkan (*penyebab berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):*

- d) jumlah SDM yang terbatas*
- e) keterbatasan jaringan internet*
- f)...*

*Akibatnya (*akibat berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):*

- a) Pencatatan hasil vaksinasi pada PCARE tidak update yang dapat dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh Kementerian Kesehatan*
- b) ...*

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, terutama atas selisih yang tidak dapat dijelaskan telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya oleh Fasyankes sebagai berikut (uraikan rencana tindak lanjut oleh mitra pengawasan):

- a) ...*
- b) ...*

6) Penilaian Capaian Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Menguraikan permasalahan terkait dengan capaian pelaksanaan

vaksinasi covid-19 di daerah seperti upaya percepatan vaksinasi primer dan booster, serta upaya pemerataan vaksinasi oleh daerah. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Auditor dan rekomendasi”

Temuan terkait hal ini, antara lain:

- 1) Target sasaran dalam waktu tahapan vaksinasi yang telah ditetapkan tidak tercapai (Rendahnya capaian vaksinasi atas sasaran vaksinasi tahap primer atau booster)
- 2) vaksinasi di tiap wilayah/kecamatan yang tidak merata

Contoh Penyajian:

Temuan: Target sasaran dalam waktu tahapan vaksinasi yang telah ditetapkan tidak tercapai (Rendahnya capaian vaksinasi atas sasaran vaksinasi tahap ke- dua di beberapa Kabupaten/Kota)

Dari Kompilasi Hasil Pengawasan, terdapat kondisi capaian vaksinasi atas sasaran vaksinasi dosis kedua di beberapa kabupaten/kota masih rendah di bawah target nasional dosis lengkap sebesar 70% per tanggal (cut off pengawasan), yang diuraikan dalam tabel berikut:

No	Nama Kabupaten/ Kota	Target per Kabupaten/Kota	Capaian dosis kedua (orang) (per tanggal cut off pengawasan)	Capaian dosis kedua dibanding target wilayah masing2 (%)
1	Kabupaten A Orang Orang %
2	Kabupaten B Orang Orang %
3.	Kota A Orang Orang %

Hal ini disebabkan (*penyebab berikut hanya contoh, uraikan penyebab yang ditemukan di lapangan saat dilakukan pengawasan):

No	Rincian Penyebab	Jumlah Kejadian (sebutkan jumlah dan lokasi kab/kot nya)
1.	<i>Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mempunyai rencana grand design percepatan vaksinasi daerah seperti tidak melakukan perhitungan proyeksi pencapaian target daerah, tidak menetapkan target laju vaksinasi harian daerah, dll</i>	5 lokasi yaitu di Kabupaten A, B, C, dst
2.	<i>Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tidak melakukan pendataan atas sisa target sasaran vaksinasi di wilayahnya</i>	5 lokasi yaitu di Kabupaten A, B, C, dst
3.	<i>Jumlah vaksin untuk dosis 2 kurang karena Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tidak melakukan perhitungan kebutuhan jumlah dan jenis vaksin terkait percepatan vaksinasi dosis 2 di wilayahnya</i>	5 lokasi yaitu di Kabupaten A, B, C, dst
4.	<i>Lainnya (sebutkan)...</i>	5 lokasi yaitu di Kabupaten A, B, C, dst

Akibatnya (contoh: mempengaruhi capaian vaksinasi dosis kedua se-Provinsi xxx yang baru sebesar.... orang (per tanggal cut off pengawasan) atau sebesar% dari target provinsi xxx sebesar..... orang) (data diambil dari Pcare atau KPC PEN per provinsi per tanggal cut off audit)

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindak lanjutnya sebagai berikut (uraikan rencana tindak lanjut oleh mitra pengawasan):

- 1) Menetapkan target laju vaksinasi untuk dosis kedua per hari atas kabupaten/kota tersebut diatas untuk dapat mencapai target 70% suntikan kedua sampai dengan akhir bulan maret 2022 (contoh)*

2) (sebutkan rekomendasi lainnya yang relevan)

7) Penilaian efisiensi Pelaksanaan Distribusi dan Vaksinasi

Menguraikan permasalahan terkait dengan penggunaan vaksin, peralatan pendukung dan logistik serta penggunaan anggaran dalam pelaksanaan vaksinasi apakah sudah efisien (penggunaan sumber daya standar dibandingkan output yang diperoleh). Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan auditan dan rekomendasi

Contoh temuan terkait Efisiensi Pelaksanaan Vaksinasi antara lain:

- Pengambilan, pemakaian dan penyimpanan vaksin oleh tim vaksinasi tidak sesuai ketentuan.
- Pemakaian vaksin melebihi wastage rate yang telah ditetapkan

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Fasyankes, dan kegiatan vaksinasi di luar Fasyankes Ditemukan Pemakaian vaksin melebihi wastage rate yang telah ditetapkan, yaitu pada Puskesmas A, Puskesmas B, Puskesmas C, dst...

*Jika dimungkinkan agar membuat lampiran atas kondisi temuan audit yang lebih rinci yang terjadi pada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, per fasyankes, dan per kegiatan vaksinasi di luar fasyankes yang telah dilakukan uji petik.

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

- a. ...
- b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Fasyankes terkait sebagai berikut:

- a.
- b.

8) Kecukupan Pengendalian Risiko Fraud

Menguraikan permasalahan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal pada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mengendalikan kemungkinan terjadinya fraud pada pelaksanaan vaksinasi covid-19. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Auditan dan rekomendasi".

Contoh temuan terkait fraud antara lain:

- *Adanya pungutan liar dalam kegiatan vaksinasi.*
- *Terdapat indikasi kuat adanya jual beli vaksin covid-19 program*

Contoh Penyajian:

Berdasarkan audit pada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Fasyankes, dan kegiatan vaksinasi di luar Fasyankes Ditemukan Terdapat pungutan liar dalam pelaksanaan vaksinasi, yaitu pada Puskesmas A, Puskesmas B, Puskesmas C, dst...

**Jika dimungkinkan agar membuat lampiran atas kondisi temuan audit yang lebih rinci yang terjadi pada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, per fasyankes, dan per kegiatan vaksinasi di luar fasyankes yang telah dilakukan uji petik*

Kondisi ini tidak sesuai dengan (sebutkan kriteria yang digunakan)

Hal ini disebabkan:

a. ...

b. ...

Akibatnya.....

Sehubungan dengan permasalahan tersebut telah diberikan rekomendasi dan disepakati tindaklanjutnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Fasyankes terkait sebagai berikut:

a.

b.

8. Hal – hal yang perlu diperhatikan

Menguraikan permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan audit di Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan fasyankes namun tidak masuk dalam kategori suatu temuan hasil audit karena tidak memenuhi atribut temuan audit (kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat) serta Temuan Audit lainnya yang tidak ada di TAO bersumber Lap KODE A3, B3, C1, C2, D1, D2, E1, dan E2.

Catatan: Apabila diperlukan dapat diberikan saran/rekomendasi kepada Gubernur untuk menindaklanjuti hal – hal penting yang menjadi kewenangan Gubernur.

Demikian kami disampaikan, atas perhatian Bapak Gubernur...

diucapkan terima kasih.

**Kepala BPKP
Perwakilan**

.....

NIP

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Deputi Kepala BPKP PIP Bidang Polhukam PMK
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.....

LOGO/KOP SURAT

APIP PELAKSANA MONITORING

LAPORAN HASIL MONITORING
PELAKSANAAN VAKSINASI DI LUAR FASYANKES
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI
COVID-19 PADA
(NAMA TEMPAT/LOKASI VAKSINASI)
DI KABUPATEN/KOTA...../
PROVINSI...../KEMENTERIAN/LEMBAGA...
.....

NOMOR :
TANGGAL : 2022

LOGO/KOP BPKP/APIP K/L/DAERAH
Identitas dan Alamat APIP

Nomor : 2021
 Lampiran : ...
 Hal : Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan
 Vaksinasi Di Luar Fasyankes Dalam
 Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19
 pada di Kabupaten/Kota.....
 Provinsi.....

Yth. *(sesuai dengan surat penugasannya)*

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota *(untuk LAP-KODE A.M)*
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi *(untuk LAP-KODE B.M)*
 3. Pimpinan/Penanggung jawab kegiatan vaksinasi *(untuk LAP-KODE C.M;D.M;E.M)*
- di

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Di Luar Fasyankes Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada di Kabupaten/Kota..... Provinsi....., dengan pokok bahasan sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan Penugasan

Dasar pelaksanaan penugasan adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan *(untuk BPKP)*;
- c. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

- HK.01.07/MENKES/4638/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (jika ada Juknis yang terbaru, maka dapat menggunakan juknis yang terbaru/terupdate);
- f. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-514/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tahap III dan IV bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - g. Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-472/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Tingkat Daerah;
 - h. Keputusan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan nomor KEP- /D2/03/2022 tentang Panduan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2022;
 - i. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/423/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); (jika ada Juknis yang terbaru, maka dapat menggunakan juknis yang terbaru/terupdate)
 - j. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP/ Inspektur K/L/Daerah..... Nomor ST-..... tanggal Perihal

2. Tujuan Penugasan

Tujuan Monitoring adalah untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan Program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang dilaksanakan di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan vaksinasi telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui.

3. Batasan Tanggung Jawab

APIP hanya bertanggungjawab sebatas simpulan hasil monitoring. Kebenaran dan validitas dokumen yang disampaikan kepada APIP sebagai dasar pengambilan simpulan menjadi tanggungjawab manajemen program atau pihak-pihak terkait yang menyampaikan dokumen.

4. Metodologi monitoring

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring program vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 adalah:

- a. Perencanaan monitoring antara lain pemahaman bisnis proses, pengumpulan aturan terkait prosedur kegiatan vaksinasi, penyusunan surat tugas serta penetapan waktu monitoring.
- b. Melaksanakan kegiatan monitoring atas kegiatan vaksinasi yang dilakukan di luar fasyankes sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
- c. Membandingkan kondisi di lapangan dengan kriteria yang ditetapkan
- d. Wawancara/konfirmasi pihak-pihak terkait atas permasalahan yang ditemukan
- e. Penyusunan laporan hasil monitoring

5. Data Objek yang Dilakukan Monitoring

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Tanggal pelaksanaan vaksinasi	Penanggungjawab Kegiatan	Sumber Dana (APBN/APBD/Lainnya)	Fasyankes yang terlibat
1.	Vaksinasi massal A	(mulai tanggal) s.d (selesai tanggal)	Dinas Kesehatan Kab/Kota *	APBD *	*1. Puskesmas manggarai *2. Puskesmas Utan Kayu *3. Dst..
2.	Vaksinasi massal B					
3.	Serbuan Vaksin TNI/Polri					
4.	Gerai vaksin Polri					
5.	Dst.....					

* Isian tabel hanya merupakan contoh

6. Hasil Monitoring

Kami telah melakukan monitoring Kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di Luar Fasyankes, dengan rincian sebagai berikut:

a. Target dan Realisasi Sasaran Vaksinasi

Tabel-1 Sasaran vaksinasi

No	Nama Kegiatan Vaksinasi	Jenis vaksin yang digunakan	Jumlah Target Sasaran	Suntikan	
				Divaksin	KIPI
(1)	(2)	(2.a)	(3)	(4)	(5)

1.	Kegiatan A	SDM Kesehatan	...Org	...Org	...Org
		Lansia	...Org	...Org	...Org
		Petugas Publik	...Org	...Org	...Org
		Masyarakat rentan dan Umum	...Org	...Org	...Org
		Remaja	...Org	...Org	...Org
		Anak-anak	...Org	...Org	...Org
2.	Kegiatan B		...Org	...Org	...Org
3.	Kegiatan C		...Org	...Org	...Org
4.	dst		...Org	...Org	...Org
Jumlah total				...Org	...Org

Sumber Data :..... Per tanggal:

Data dapat diambil dari P-Care atau aplikasi resmi lain yang digunakan.

Keterangan table:

- 1) Menginformasikan total target sasaran vaksinasi dan realisasi dalam satu periode kegiatan (isian kolom 3)
- 2) Jumlah sasaran yang divaksin (isian kolom 4)
- 3) Jumlah kejadian KIPI pada masing-masing fasyankes yang dimonitoringnya (isian kolom 5)

b. Alokasi dan Realisasi Distribusi dan Penggunaan Vaksin

Tabel- 2 mutasi pergerakan Vaksin

No	Nama Kegiatan vaksinasi	Jenis/ merk Vaksin	Asal / Sumber Vaksin	Berdasarkan Catatan			Sisa Vaksin (Stock Opname)	Selisih	Keterangan
				Vaksin diterima	Vaksin digunakan	Sisa Vaksin			
(1)	(2)			(3)	(4)	(5=3-4)	(6)	(7=5-6)	(8)
1.	Vaksinasi massal A			...Dosis	...Dosis	...Dosis	...Dosis	...Dosis	
2.	Vaksinasi massal B			...Dosis	...Dosis	...Dosis	...Dosis	...Dosis	
3.	Vaksinasi massal C			...Dosis	...Dosis	...Dosis	...Dosis	...Dosis	
4.	Dst.....			...Dosis	...Dosis	...Dosis	...Dosis	...Dosis	
	Jumlah			...Dosis	...Dosis	...Dosis	...Dosis	...Dosis	

- 1) Menginformasikan jenis vaksin yang digunakan, misal: Sinovac, astrazeneca, novavax, Pfizer, atau lainnya.
- 2) Menginformasikan asal/sumber vaksin yang digunakan untuk kegiatan

vaksinasi (misal dari Bufferstock Kab/Kota, Bufferstock Provinsi, atau Bufferstock Kementerian Kesehatan)

- 3) *Menginformasikan distribusi dan penggunaan vaksin di masing-masing kegiatan*
- 4) *Menginformasikan realisasi distribusi vaksin yang diterima serta jumlah vaksin yang digunakan dalam rangka pelaksanaan vaksinasi.*
- 5) *Menginformasikan stock akhir vaksin di masing-masing fasyankes berdasarkan catatan (isian kolom 5) dan stock akhir vaksin berdasarkan stock opname (isian kolom 6)*
- 6) *Menginformasikan selisih stock akhir berdasarkan catatan dan stock opname dan menjelaskan kondisi selisih vaksin (isian kolom 7)*
- 7) *Menginformasikan kondisi vaksin (isian kolom 8).*

Sumber Data:..... Per tanggal:

7. Temuan Hasil monitoring.

a. Penilaian Ketepatan Sasaran

Menguraikan permasalahan ketepatan sasaran antara lain terkait ketepatan sasaran program vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan monitoring. Temuan minimal mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Penanggungjawab Kegiatan dan rekomendasi”. Temuan monitoring agar mencantumkan identitas lokasi vaksinasi atau membuat daftar jika temuan monitoring dijumpai pada beberapa lokasi kegiatan.

Contoh temuan terkait ketidaktepatan sasaran, antara lain:

- *Terdapat Penolakan Vaksinasi COVID-19 oleh sasaran*
- *Terdapat penyuntikan vaksinasi booster di luar sasaran yang telah ditetapkan*
- *Terdapat penyuntikan booster atas sasaran yang belum memiliki tiket*
- *dst*

b. Penilaian Ketepatan Jumlah

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan jumlah pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan monitoring. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Penanggungjawab Kegiatan dan rekomendasi”. Temuan monitoring agar mencantumkan identitas lokasi vaksinasi atau membuat daftar jika temuan monitoring dijumpai pada

beberapa lokasi kegiatan.

Contoh temuan terkait ketidaktepatan Jumlah, antara lain:

- 3) *Jumlah vaksin yang dialokasikan dan didistribusikan tidak cukup memenuhi kebutuhan*
- 4) *Jumlah peralatan pendukung dan logistic tidak memenuhi kebutuhan*
- 5) *Jumlah Vaksinator dan Tenaga Kesehatan lainnya tidak memenuhi kebutuhan vaksinasi*
- 6) *dst*

c. Penilaian Ketepatan Waktu

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan waktu pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan monitoring.

Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, dan tanggapan Penanggungjawab Kegiatan dan rekomendasi”. Temuan monitoring agar mencantumkan identitas lokasi vaksinasi atau membuat daftar jika temuan monitoring dijumpai pada beberapa lokasi kegiatan.

Contoh temuan terkait ketidaktepatan waktu antara lain:

- *Pelaksanaan vaksinasi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan*
- *Distribusi vaksin terlambat.*
- *Distribusi alat pendukung terlambat*
- *dst*

d. Penilaian Ketepatan Kualitas

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan kualitas pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan monitoring. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, dan tanggapan Penanggungjawab Kegiatan dan rekomendasi”. Temuan monitoring agar mencantumkan identitas lokasi vaksinasi atau membuat daftar jika temuan monitoring dijumpai pada beberapa lokasi kegiatan. Jika memungkinkan, Tim agar melakukan koordinasi dengan BPOM setempat atas hasil monitoring mengenai ketepatan kualitas.

Contoh temuan terkait ketidaktepatan kualitas antara lain:

- *Penyimpanan vaksin tidak sesuai standar suhu penyimpanan*
- *kualitas cold chain tempat penyimpanan vaksin covid-19 tidak*

memadai

- *Jenis peralatan pendukung dan logistic tidak memenuhi kebutuhan*
- *Pengambilan, pemakaian dan penyimpanan vaksin oleh tim vaksinasi tidak sesuai ketentuan*
- *dst*

e. Penilaian Ketepatan Administrasi

Menguraikan permasalahan terkait dengan ketepatan administrasi pada pelaksanaan vaksinasi yang dijumpai dalam pelaksanaan monitoring. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, dan tanggapan Penanggungjawab Kegiatan dan rekomendasi”. Temuan monitoring agar mencantumkan identitas lokasi vaksinasi atau membuat daftar jika temuan monitoring dijumpai pada beberapa lokasi kegiatan.

Contoh temuan terkait ketidaktepatan administrasi antara lain:

- *Sentra vaksinasi belum terkoneksi dengan aplikasi P-Care dan aplikasi SMILE*
- *Tidak dilakukan pencatatan atas penggunaan vaksin secara manual maupun elektronik secara tertib*
- *Pelaporan kegiatan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi Pcare tidak optimal*
- *dst*

f. Efisiensi Pelaksanaan Vaksinasi

Menguraikan permasalahan terkait dengan penggunaan vaksin, peralatan pendukung dan logistic serta penggunaan anggaran dalam pelaksanaan vaksinasi apakah sudah sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan efisien (penggunaan sumber daya standar dibandingkan output yang diperoleh). Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas “kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Penanggungjawab Kegiatan dan rekomendasi”.

Contoh temuan terkait Efisiensi Pelaksanaan Vaksinasi antara lain:

- *Pengambilan, pemakaian dan penyimpanan vaksin oleh tim vaksinasi tidak sesuai ketentuan.*
- *Pemakaian vaksin melebihi wastage rate yang telah ditetapkan*
- *Dst*

g. Kecukupan Pengendalian Risiko Fraud

Menguraikan permasalahan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal pada masing-masing Fasyankes dalam mengendalikan kemungkinan terjadinya fraud pada pelaksanaan vaksinasi. Temuan harus mengungkapkan secara jelas dan ringkas "kondisi, kriteria, penyebab, akibat, tanggapan Pimpinan Fasyankes dan rekomendasi".

Contoh temuan terkait ketidaktepatan administrasi antara lain terdapat pungutan liar dalam pelaksanaan vaksinasi dan indikasi kuat adanya Jual beli vaksin program

8. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bagian ini adalah permasalahan-permasalahan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan monitoring namun tidak masuk dalam kategori suatu temuan hasil monitoring karena tidak memenuhi unsur-unsur temuan (kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat).

(Temuan lainnya yang tidak ada di TAO).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pimpinan APIP Pelaksana Monitoring

.....

NIP

Tembusan Yth:

1. Inspektur Kabupaten/Kota.... (untuk LAP KODE-A.M)
2. Inspektur Provinsi..... (untuk LAP KODE-B.M)
3. BPKP Perwakilan Provinsi....(untuk LAP KODE-D.M dan E.M)
4. Irjen K/L/TNI/Irwasum....(untuk LAP KODE-E.M dan KODE C.M)

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,


MUHAMMAD YUSUF ATEH